

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A - Kuesioner Penelitian

Lampiran B – Tabulasi Hasil Jawaban Responden

Lampiran C – Hasil *Output* SPSS

Lampiran D – Surat Survei

Lampiran E – Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran F – Revisi Skripsi

Lampiran G – Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya era demokrasi dan birokrasi maka semakin banyak tuntutan publik agar tercipta adanya transparansi dan akuntabilitas, agar kepercayaan tetap solid maka perlu diciptakan suatu kondisi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, kondisi ini disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Istilah *Good Corporate Governance* tersebut muncul terutama sejak adanya skandal Internasional, seperti kasus Enron dan WorldCam, dengan demikian GCG tersebut bukan merupakan pola baru atau merupakan sebuah inovasi, tetapi merupakan sesuatu pertanggungjawaban kepada publik mengenai perkembangan yang ada menurut Dwi Novi Kusumawati (2007:132).

Konsep GCG ini mempunyai maksud tata kelola organisasi atau pemerintahan yang baik, ditinjau dari konsep GCG maka mencakup tidak hanya diterapkan pada sektor pemerintahan saja tetapi juga pada sektor swasta, yang jelas tuntutan untuk transparan dan akuntabiliti diperlukan dalam konsep ini. Pelaksanaan GCG ini dalam kenyataannya menemui banyak kendala, diantaranya adalah masalah penyimpangan yang banyak terjadi, misalnya adanya penyelewengan terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini tidak akan terjadi apabila kontrol dalam perusahaan dilaksanakan dengan efektif, dalam hal ini sistem perlu ditegakkan, yaitu perlu penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Suatu perusahaan dengan SPI yang kuat maka setidaknya penyimpangan-

penyimpangan dapat diminimumkan. Pihak yang dianggap berperan dalam penegakan SPI ini adalah Internal Auditor menurut Dwi Novi Kusumawati (2007:132).

Good Corporate Governance merupakan sistem bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan. Sistem *governance* antara lain mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi. *Corporate Governance* mengatur hubungan antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan manajemen perusahaan agar terjadi keseimbangan dalam pengelolaan organisasi. Adanya penerapan *Good Corporate Governance* mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya *Good Corporate Governance* oleh perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan menurut Risma Indhira (2007).

Salah satu penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan diberbagai negara di Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan tata kelola perusahaan, baik perusahaan yang mayoritas dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki swasta. Dengan buruknya pelaksanaan tata kelola perusahaan maka tidak dapat menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya praktik-praktik yang dapat membahayakan perusahaan seperti praktik *korupsi, kolusi dan nepotisme* (KKN) yang sangat bertentangan dengan prinsip GCG. Hal tersebut akan sulit untuk dideteksi, karena akan diketahui apabila adanya kebetulan atau suatu hal yang disengaja. Praktik ini juga akan menjadi ancaman berbahaya untuk perusahaan, karena tindakan tersebut memiliki efek terhadap resiko kerugian keuangan yang

berakibatkan perusahaan dapat mengalami kebangkrutan menurut Baird dalam Azhar Maksum (2005).

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 juli 2002 yang kemudian diubah menjadi PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara menekankan Kewajiban bagi BUMN untuk menetapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. (www.bpkp.go.id)

Dalam banyak kasus saat ini, banyak sekali terjadi skandal bisnis (manipulasi laporan keuangan) maupun hancurnya atau jatuhnya korporasi terbukti ada kaitannya dengan *good corporate governance* dan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Salah satunya pada bidang perbankan yaitu fenomena penutupan BPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menutup empat bank perkreditan rakyat (BPR) akibat gulung tikar dikarenakan kondisi keuangan pada 2015 terjadi penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan, mengakui, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kinerja keuangan sebuah BPR menjadi bermasalah hingga berujung pada pencabutan izin usaha. Baik OJK maupun Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyatakan bahwa kebanyakan BPR yang dicabut izin usahanya bukan karena

kalah dalam persaingan, melainkan lebih disebabkan fraud yang dilakukan pengurus BPR. Salah satunya, karena BPR tidak melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG). (**Fauzi Ichsan, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)** (<http://infobanknews.com>))

Selain itu, PT. Pos Indonesia masih tersangkut masalah korupsi didalam pengelolaan perusahaannya, Setelah Kejaksaan Agung mengungkapkan kasus korupsi pengadaan Portable Data Terminal (PDT) di perusahaan itu dimana kecurangan terjadi pada saat proses pengadaan barang. Ini di karenakan kurangnya pengawasan dan kurang baiknya tata kelola perusahaan yang di miliki oleh PT. Pos Indonesia sehingga terjadi kendala dari 1725 alat PDT (Portable Data Terminal) yang dibeli hanya 50 alat yang berfungsi, dan alat tidak sesuai spesifikasi yang tertera dalam kontrak. Salah satu dalam kekurangan dalam alat tersebut adalah tidak adanya GPS dan daya baterai yang hanya bertahan selama tiga jam. Padahal dalam kontrak, alat tersebut memiliki GPS dengan daya tahan baterai mencapai delapan jam. Ditaksir kerugian kasus ini mencapai Rp9,56 miliar. (**Ramidi, M. Rum Kepala Kejaksaan Agung, Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2016 dari** (www.gresnews.com))

Banyak perusahaan akhirnya mengelola perusahaan dengan indikasi penyimpangan akuntansi. Untuk itu sudah saatnya akuntabilitas Dewan Komisaris perlu ditingkatkan dengan membentuk Komite Audit. Komite Audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balance* menurut Risma Indhira (2007).

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI, 2016) mendefinisikan Komite Audit sebagai berikut, Suatu Komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan.

Komite Audit terhadap GCG juga erat kaitannya untuk dapat dijadikan tolak ukur bagi suatu perusahaan. Karena Komite audit bertanggungjawab memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, dan bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan perlindungan yang optimum kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. FCGI (2006:148)

Audit internal merupakan suatu kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi suatu organisasi tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan dengan mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian,

dan tata kelola (*Governance*) mealalui pendekatan yang teratur dan sistematis (*Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (SSPIA, 2009)

Menurut The Institute of Internal Auditors dalam laporan publikasinya yang berjudul : “*The Role of Internal Audit in Corporate Governance and Management*” bahwa bursa efek NewYork di Amerika Serikat dan beberapa bursa efek di negara lainnya mengharuskan perusahaan yang *go public* untuk memiliki auditor internal dalam rangka memberikan penilaian atas pengendalian internal dan manajemen risiko. Bahkan di beberapa perusahaan swasta, meskipun tidak ada kewajiban, mereka juga turut membentuk departemen audit internal dalam organisasinya. Ketentuan untuk keharusan memiliki departemen audit internal yang sudah *go public* ini mulai berlaku efektif pada tanggal 31 Oktober 2004.

Adapun hubungan Auditor Internal terhadap GCG dapat berperan dalam terwujudnya GCG di perusahaan. Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan penuh dari auditor internal seperti, Mendorong *Transparansi* dan Integritas dalam pelaporan keuangan perusahaan, Mendorong *Akuntabilitas* dalam pengelolaan aset perusahaan, Mendorong *Pertanggungjawaban* perusahaan kepada publik melalui *corporate social responsibility* (CSR), *community development*, atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Mendorong *Indenpendensi* perusahaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemegang saham minoritas, dan Mendorong *Kewajaran* dalam pengadaan barang dan jasa termasuk dipastikannya tidak ada pelanggaran terhadap UU anti monopoli dan persaingan usaha yang sehat menurut Arief Effendy (2016).

Menurut Ulfany (2016), Adanya kasus di atas mungkin terjadi akibat kurangnya peranan Audit Internal dan menjadi pertanyaan banyak pihak yaitu di manakah komite audit atau Satuan Pengawas Intern ketika penyimpangan dan pelanggaran terjadi atau bagaimana fungsi Audit Internal bisa berjalan sehingga kondisi tersebut tidak terdeteksi dengan melakukan tata kelola yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi yang berjudul :

“PENGARUH PERAN KOMITE AUDIT DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah Komite Audit Berpengaruh Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia.
2. Apakah Audit Internal Berpengaruh Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia.
3. Apakah Komite Audit dan Audit Internal Berpengaruh Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian di PT Pos Indonesia di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apakah Komite Audit Berpengaruh Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia.

2. Untuk mengetahui Apakah Audit Internal Berpengaruh Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia.
3. Untuk mengetahui Apakah Komite Audit dan Audit Internal Berpengaruh Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi syarat dalam mengajukan skripsi program studi akuntansi pada fakultas ekonomi Universitas Widyatama. Peneliti juga mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat, dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bidang audit internal terutama mengenai pengaruh peran komite audit dan audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna sebagai bahan masukan untuk PT Pos Indonesia (Persero). Khususnya Audit Internal dan *Good Corporate Governance*, sehingga dimasa yang akan datang *Good Corporate Governance* di PT Pos Indonesia bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau masukan bagi

penelitian selanjutnya untuk menyajikan topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Pos Indonesia. Yang berlokasi di Jl. Jakarta No.34 Kota Bandung. Adapun waktu yang akan digunakan dari Bulan Januari sampai dengan selesai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komite Audit

2.1.1 Pengertian Komite Audit

Berdasarkan kerangka dasar hukum di Indonesia perusahaan-perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur publik merupakan perusahaan milik masyarakat luas menurut Zakarsyi (2008:16). Bahkan, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari di luar bursa efek juga terkena kewajiban untuk membentuk komite audit yang salah satu tugasnya berkaitan dengan audit eksternal berhubungan dengan audit internal dan pengendalian internal.

Pengertian komite audit menurut Arens *et al.*, (2010) adalah berikut :

“An audit committee is a selected number of members of company’s board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committee are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not a part of company management”

Menurut Peraturan Nomor IX dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK (2012), yang dimaksud dengan Komite Audit adalah:

“Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris”

Sedangkan pengertian komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Arief Effendi (2016:48) adalah berikut:

“Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan”

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa sebuah komite audit merupakan orang yang dipilih anggota dewan direktur perusahaan yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor tetap independen dari manajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari 3-5 atau kadang-kadang sebanyak tujuh direktur yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan menurut Vindi Berlian (2014).

Ketentuan mengenai komite audit BUMN diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003. Pasal 70 UU tersebut menyebutkan bahwa komisaris dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit tersebut dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada komisaris atau dewan pengawas. Ketua komite audit adalah anggota komisaris independen, yang diangkat oleh komisaris menurut Arief Effendi (2016:51).

2.1.2 Tujuan Komite Audit

Menurut Destiana (2014), dibentuknya Komite Audit oleh dewan komisaris memiliki tujuan diantaranya:

1. Memastikan laporan keuangan yang diterbitkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi berterima umum.
2. Memastikan bahwa pengendalian internal perusahaan memadai.
3. Menindak lanjuti terhadap adanya dugaan penyimpangan yang sifatnya material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Menurut Keputusan Bapepam Peraturan Nomor IX.I.5 tujuan dibentuknya Komite Audit adalah membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dalam surat Edarannya Nomor Kep-643/BL/2012 mengatakan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk:

1. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Menurut Zakarsyi (2008:17), Seiring dengan karakteristik tersebut, otoritas Komite Audit juga terkait dengan batasan mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris. Mereka tidak memiliki otoritas eksekusi apapun hanya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplit dari Dewan Komisaris, misal: mengevaluasi dan menentukan kompensasi Auditor Eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus.

Dalam menjalankan perannya, Komite Audit harus memiliki hak terhadap akses tidak terbatas kepada Direksi, Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan semua informasi yang ada di perusahaan. Tanpa otoritas atau hak atas akses tersebut, akan tidak mungkin Komite Audit dapat menjalankan perannya dengan efektif.

2.1.3 Fungsi Komite Audit

Komite Audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris menjadi intermediaries atau penghubung antara Dewan Komisaris dan Auditor Eksternal perusahaan public. Dengan demikian, sejalan dengan kapasitasnya sebagai pihak yang menghubungkan antara dewan direksi selaku wakil dari pemegang saham dan auditor independen, maka fungsi komite audit menurut Zakarsyi (2008:18) pada intinya adalah :

1. Memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor independen.
2. Berkonsultasi untuk menentukan auditor independen.
3. Berkonsultasi dengan auditor independen dalam menganalisis laporan audit dan menyertai dalam *management letter*.
4. Berkonsultasi dengan auditor independen.

Menurut Kurniawan (2015), Komite Audit memiliki fungsi untuk memastikan tercapainya hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan organisasi telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Struktur pengendalian internal telah mencukupi dan efektif.
- c. Audit internal dan eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang ada.
- d. Temuan-temuan audit telah ditindaklanjuti oleh manajemen.

Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) yang dikutip Arief Effendi (2016:55), yaitu komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, keterbukaan, dan objektivitas dewan komisaris, serta memiliki fungsi untuk:

- a. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris
- b. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan
- c. Memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif
- d. Membantu direktur keuangan dengan memberikan suatu kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan

- e. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif
- f. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen
- g. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.

2.1.4 Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Penerbitan peraturan ini menyempurnakan sekaligus mencabut keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. (www.komiteaudit.org)

Penyempurnaan Peraturan ini dimaksudkan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 untuk meningkatkan Independensi, peran dan kewenangan Komite Audit dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, masa tugas, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat, dan

pelaporan Komite Audit, serta sanksi. Beberapa pokok penyempurnaan yang diatur dalam peraturan dimaksud antara lain:

1. Penegasan Pengertian Komite Audit dan Komisaris Independen dan Independensinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
2. Kewajiban untuk memiliki piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) dan pemuatannya pada *website* Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Penambahan dan penyempurnaan persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang Komite Audit.
4. Pengaturan mengenai pelaksanaan rapat Komite Audit secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan, jumlah *quorum* peserta rapat, pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan risalah rapat, termasuk penguangan adanya perbedaan pendapat.
5. Pengaturan mengenai sistem pelaporan terkait informasi pengangkatan/pemberhentian Komite Audit kepada Bapepam-LK yang juga wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan atau laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik.

Jenis tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang diangkat oleh Ketua Bapepam-LK yang dikutip oleh Destiana (2014) dalam sebuah perusahaan yang satu tidak pernah sama persis dengan perusahaan yang lain. Hal ini disebabkan adanya perbedaan skala, jenis usaha, kebutuhan dan domisili masing-masing perusahaan. Walaupun demikian, tugas dan tanggung jawab Komite Audit tidak boleh menyimpang dari tugas dan tanggung jawab *Board of commissioner*.

Wewenang Komite Audit harus meliputi :

1. Menyelidiki semua operasional perusahaan dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan.
3. Mengusahakan saran hukum dan saran professional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.
4. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman yang sesuai, apabila dianggap perlu.

Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu dewan komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya rekomendasi kepada dewan komisaris) kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus.

Menurut Surya dan Yustiavandana (2006:148) mengutip tanggung jawab Komite Audit dari *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yakni mengemukakan bahwa Komite Audit mempunyai tanggung jawab dalam hal memberikan pengawasan secara menyeluruh dalam hal memberikan pengawasan secara menyeluruh dalam hal :

1. Laporan Keuangan

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-

hal sebagai berikut: a) Kondisi Keuangan b) Hasil Usahanya, c) Rencana dan Komitmen jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan dalam bidang *Corporate Governance* untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan / Manajemen Risiko dan Kontrol

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan keefektifan sistem pengawasan intern.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 Tentang Komite Audit bagi BUMN. Dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN tersebut dinyatakan bahwa tugas komite audit menurut Arief Effendi (2016:52), terdiri dari lima hal, yaitu:

1. Membantu komisaris/dewan pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal.

2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris/dewan pengawas serta tugas-tugas komisaris/dewan pengawas lainnya.

2.2 Audit Internal

2.2.1 Pengertian Audit Internal

Dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) yang di terbitkan oleh Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:9) dalam *International Professional Practice framework* (2011:34), pengertian Audit Internal adalah sebagai berikut:

“Audit Internal adalah suatu kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi suatu organisasi, Audit Internal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan melalui suatu pendekatan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (*governance*) melalui pendekatan yang teratur dan sistematis”

The Institute of Internal Auditors (IIA dalam IPPF) (2011:2), telah mendefinisikan Audit Internal sebagai berikut:

“Audit Internal adalah aktivitas independen, penilaian objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan. Dimana Audit Internal membantu perusahaan memenuhi tujuannya dengan

menggunakan sistematis, evaluasi dengan pendekatan disiplin dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan”

Menurut Hary (2013:32) mengatakan :

“Audit Internal adalah fungsi penilaian yang dikembangkan secara beban dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan.”

Berdasarkan ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan kegiatan yang bersifat independen dan objektif dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengolahan risiko, pengendalian, dan proses *governance* yang bersifat melindungi dan konstruktif bagi pimpinan perusahaan menurut Ridhan Nugraha (2016).

2.2.2 Fungsi Audit Internal

Fungsi Audit Internal menurut Sawyer (2009:28) yaitu sebagai berikut:

”Fungsi audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan perusahaan untuk memberikan saran-saran kepada manajemen”

Fungsi Audit Internal yang dikemukakan Kurniawan (2015), dalam Lilir Sundayani (2013:28) adalah:

“Fungsi Audit Internal adalah memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kinerja dan audit operasional yang akan dapat membantu manajemen senior dan dewan komisaris di dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil di dalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi”

Fungsi Audit Internal menurut *The Institute of Internal Auditors* pada *International Profesional Practice Framework* (IPPF, 2011:27) sebagai berikut:

“The internal audit must evaluated and contibute to the improvement of governance, risk management, and control processes using a systematic and disciplined approach”

2.2.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Ruang Lingkup Audit Internal menurut *International Professional Practices Framework (IPPF)* dalam *The Institute of Internal Auditors* (2011:27) yaitu:

“The internal audit activity must evaluated and contibute to the improvement of governance, risk management, and control processes using a systematic and disciplined approach”

Ruang lingkup Audit Internal menurut Kaunang (2013:6), adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menggunakan semua catatan yang dalam perusahaan/grup perusahaan, dan memberikan *advice* kepada pimpinan perusahaan, baik Direktur Utama maupun Direktur lainnya.
- b. *Me-review* dan menilai kebenaran dan kecukupan data-data akuntansi dan keuangan dalam penerapan untuk pengawasan operasi perusahaan.
- c. Memastikan tingkat dipatuhinya kebijaksanaan, perencanaan, dan prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Memastikan bahwa harta perusahaan telah dicatat dengan benar dan disimpan dengan baik sehingga dapat terhindar dari pencurian dan kehilangan.
- e. Memastikan dapat dipercayainya data-data akuntansi dan data lainnya yang disajikan oleh perusahaan.

- f. Menilai kualitas dan pencapaian prestasi manajemen perusahaan berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemegang saham.
- g. Laporan dari waktu ke waktu kepada manajemen dari hasil pekerjaan yang dilakukan, identifikasi masalah dan saran/solusi yang harus diberikan.
- h. Bekerja sama dengan Eksternal Auditor sehubungan dengan penilaian atas Pengendalian Intern (*Internal Control*)

Ruang Lingkup Audit Internal menurut Hiro Tugiman (2006:99-100) dalam Dhany Ramadhan (2014:10) meliputi, Ruang Lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan *system* pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan Internal harus:

1. *Me-review* keandalan (reabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
2. *Me-review* berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.

3. *Me-review* berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya.
5. *Me-review* berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut *Institute of Internal Audit (IIA)* yang dikutip oleh Moeller (2009), tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian *intern*, dan operasional pengendalian lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak mahal.
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.

4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi yang dapat dipercaya.
5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.

2.2.4 Standar Profesi Audit Internal

Standar Profesi Audit Internal menurut Andayani (2008), adalah sebagai berikut:

a. Standar Perilaku

Standar perilaku auditor internal meliputi:

1. Auditor Internal harus jujur, objektif, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
2. Auditor Internal harus loyal terhadap organisasi atau pihak yang dilayani. Namun auditor internal tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang menyimpang dan melanggar hukum.
3. Auditor Internal tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang mendiskreditkan profesi auditor internal atau organisasinya.
4. Auditor Internal tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, mitra bisnis organisasi, sehingga mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.

b. Standar Profesi

Standar profesi dalam berisi standar atribut dan standar kinerja. Dalam standar atribut memuat tujuan, kewenangan dan tanggung jawab, independensi dan objektivitas auditor internal. Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab auditor

internal harus dinyatakan secara formal dalam charter auditor internal, konsisten dengan standar profesi auditor internal (SPAI) dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi.

c. Standar Kinerja

1. Pengelolaan Fungsi Auditor Internal

Penanggung jawab fungsi auditor internal harus mengelola fungsi auditor internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.

2. Komunikasi dan Persetujuan

Penanggung jawab fungsi auditor internal harus mengkomunikasikan rencana kegiatan audit dan kebutuhan sumber daya kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi untuk mendapat persetujuan.

3. Kebijakan dan Prosedur

Penanggung jawab fungsi auditor internal harus menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi auditor internal.

4. Laporan Kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas

Penanggung jawab fungsi auditor internal harus menyampaikan laporan secara berkala kepada pimpinan dan dewan pengawas mengenai perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup sasaran, wewenang, tanggung jawab dan kinerja fungsi auditor internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal yang dikutip Nurjanah, Rosi (2015) yang terdiri atas *The Institute of*

Internal Auditors-Indonesia Chapter (IIA), Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD, Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), Dewan Sertifikasi Internal Auditor (DS-QIA) dan Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) dengan ini memandang perlu untuk menertibkan Standar Profesi Audit Internal (SPAI). Standar yang ditetapkan secara bersama-sama ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan kegiatannya.

Standar dan Pedoman Praktik Audit Internal:

1. Standar Profesi Audit Internal terdiri dari Standar Atribut, Standar Kinerja dan Standar Implementasi. Standar Atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Standar Kinerja menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit, memberikan praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tinjau lanjut. Standar Implementasi hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu, standar implementasi yang akan diterbitkan dimasa mendatang adalah standar implementasi untuk kegiatan *assurance* (A), standar implementasi untuk kegiatan *consulting* (C), standar implementasi untuk kegiatan investigasi (I), dan standar implementasi *Control Self Assesment* (CSA).
2. Standar-Standar tersebut terdahulu merupakan bagian dari pedoman praktik Audit Internal. Keseluruhan pedoman praktik Audit Internal terdiri atas:
 - a. Definisi Audit Internal
 - b. Kode Etik Profesi Audit Internal
 - c. Standar Profesi Audit Internal

- d. Interpretasi dari pedoman tersebut diatas
3. Pada masa yang akan datang, penerbitan standar-standar implementasi dan pedoman lainnya akan didahului dengan penyebarluasan rancangan standar (*Exposure Draft-ED*). Standar dan pedoman akan disahkan setelah paling sedikit dua bulan diedarkan dalam bentuk ED, dan mendapatkan respon yang memadai. ED akan dimuat dalam media komunikasi, jurnal, dan *website* yang dimiliki oleh masing-masing organisasi profesi anggota konsorium, serta dalam publikasi lain yang relevan.

Standar Profesi Audit Internal mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan kerangka yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor internal.
2. Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup dan tujuan audit internal.
3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi.
4. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja kegiatan operasional organisasi.
5. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi auditor internal.
6. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya.

Demikian dengan hal-hal di atas dikemukakan menurut Hery (2010:266) dalam bukunya yang berjudul Potret Profesi Audit Internal menerbitkan Standar Profesional Audit Internal dengan isi sebagai berikut :

1. Independensi

Auditor Internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor Internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (*netral*).

Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan, hal tersebut dikarenakan:

- 1) Para staf audit internal harus melaporkan kepada pimpinan audit tentang berbagai keadaan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan *audittee*.
- 2) Auditor Internal tidak boleh menerima tanggung jawab operasional.
- 3) Kewajiban manajemen adalah membuat keputusan tentang tindakan tepat yang akan dilakukan sehubungan dengan berbagai temuan pemeriksaan yang penting.
- 4) Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal harus didefinisikan dalam sebuah dokumen tertulis, sebaiknya di dalam anggaran dasar yang disetujui oleh manajemen senior dan dewan.

- 5) Pimpinan audit internal setiap tahun harus mengajukan usulan mengenai rangkuman jadwal kegiatan pemeriksaan, susunan kepegawaian, dan anggaran keuangan yang kemudian diinformasikan kepada dewan.
- 6) Pimpinan audit internal harus memberikan laporan tahunan tentang berbagai kegiatan kepada manajemen senior dan dewan, atau setiap periode dengan jangka waktu yang lebih singkat apabila dipandang perlu.

2. Kemampuan Profesional

Audit Internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh setiap auditor internal. Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik, perpajakan, dan hukum, yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Unit audit internal harus dapat memberikan jaminan atau kepastian bahwa secara teknis latar belakang pendidikan dari para pemeriksa internal telah sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan, serta unit audit internal harus memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal telah diawasi sebagaimana mestinya.

3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi.

Lingkup pekerjaan audit internal ditetapkan dalam standar profesional audit internal meliputi pemeriksaan apa saja yang harus dilaksanakan. Meninjau kecukupan suatu sistem audit internal, apakah sistem yang ditetapkan telah memberikan kepastian yang layak atau masuk akal.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil pemeriksaan, dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Auditor internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan yang harus disetujui dan ditinjau oleh pengawas.

Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan perencanaan pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang, memuat informasi dasar tentang kegiatan yang diperiksa dan program pemeriksaan, menentukan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan, memberitahukan kepada pihak yang dipandang perlu, melakukan survei secara tepat, menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan.

Kemudian dilakukan pengujian dan pengevaluasian informasi, hal tersebut diperlukan untuk membuktikan kebenaran informasi dan mendukung hasil pemeriksaan, terakhir pemeriksa internal harus melaporkan hasil dan terus-menerus

meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

2.3 *Good Corporate Governance*

2.3.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) 2011 dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *Cadbury Committee*, adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI menjelaskan bahwa tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak berkepentingan.

Menurut Kurniawan (2015:27), mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola organisasi adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham dan *stakeholder-stakeholder* lain seperti pegawai, kreditor dan masyarakat”

Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Zakarsyi (2008:35), adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya merupakan suatu *system* (*input*, proses, *output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur

hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan”

Sedangkan menurut *Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)*

(2009) adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku”

Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 juli 2002 yang kemudian diubah menjadi PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara menekankan Kewajiban bagi BUMN untuk menetapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memeperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. (www.bpkp.go.id)

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Arief Effendi (2016:7), Sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai-nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum.
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Manfaat penerapan *corporate governance*, menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2011) yaitu:

1. Lebih mudah untuk menambah modal.
2. Turunkan biaya modal.
3. Peningkatan kinerja usaha dan membaiknya kinerja ekonomi.
4. Dampak bagus pada harga saham. (karena situasi indonesia saat ini, privatisasi Badan Usaha Milik Negara dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap anggaran negara) (www.fcgi.or.id)

Manfaat penerapan Tata Kelola yang baik menurut Kurniawan (2015:33), adalah :

1. Dengan adanya *good corporate governance*, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat.
2. Meminimalisasi kemungkinan dilakukannya penyalahgunaan wewenang oleh direksi di dalam pengelolaan perusahaan.
3. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi.
4. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan karena dalam konsep tata kelola organisasi, karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholders* yang dikelola dengan baik oleh perusahaan.
5. Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

2.3.3 Konsep *Good Corporate Governance*

Konsep *Good Corporate Governance* di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Konsep *Good Corporate Governance* menurut *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) yang dikutip oleh Arief Effendi (2016:3) menyatakan dalam GCG tersirat secara implisit bahwa sebuah perusahaan bukanlah mesin pencetak keuntungan bagi pemiliknya, melainkan sebuah entitas untuk menciptakan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, perusahaan bukanlah sekedar mesin yang mengubah *input* menjadi *output*, melainkan sebuah lembaga instansi (*human institution*), sebuah masyarakat yang punya nilai, cita-cita, jati diri, dan tanggung jawab sosial. Konsep GCG mencerminkan pentingnya sikap berbagi, peduli, dan melestarikan.

Konsep *Corporate Governance* menurut Zakarsyi (2008:35), pada dasarnya merupakan suatu *system* (*input*, proses, *output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

2.3.4 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-Prinsip *corporate governance* yang dikembangkan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2016) meliputi 5 hal, antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.

Kerangka yang dibangun harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, yaitu:

- a. Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan

- b. Mengalihkan atau memindah tangankan kepemilikan saham
 - c. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur
 - d. Ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - e. Memilih anggota dewan komisaris dan direksi
 - f. Memperoleh pembagian laba perusahaan.
2. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham
Kerangka yang dibangun harus menjamin perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing.
 3. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan
Kerangka yang dibangun harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, seperti ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan.
 4. Pengungkapan dan Transparansi
Kerangka yang dibangun harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.
 5. Akuntabilitas dewan komisaris/direksi
Kerangka yang dibangun harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan

komisaris serta pertanggung jawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Prinsip-Prinsip GCG sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 yang dikutip oleh Arief Effendi (2016:11), tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, Bab II Prinsip dan Tujuan, Bagian Kesatu Prinsip, disebutkan bahwa prinsip-prinsip GCG yang dimaksud pada peraturan ini, meliputi:

1. **Transparansi** (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.
2. **Akuntabilitas** (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.
3. **Pertanggung jawaban** (*responsinility*), yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. **Kemandirian** (*independence*), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GCG sudah menjadi prasyarat mutlak bagi setiap korporasi yang *listed* di Bursa Saham atau yang terjun ke industri/bisnis yang diberlakukan regulasi pemerintah atau asosiasi di mana perusahaan tergabung menurut Kumaat (2011:23), Prinsip-Prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. ***Fairness*** adalah perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham, khususnya menyangkut hak dan kewajiban termasuk bagi pemegang saham minoritas/asing.
2. ***Transparency*** adalah keterbukaan informasi (secara akurat dan tepat waktu) mengenai kinerja perusahaan.
3. ***Accountability*** adalah bentuk tanggung jawab korporasi yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komprehensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku.
4. ***Responsibility*** adalah bentuk pertanggungjawaban seluruh *internal stakeholders* (Business Owner/RUPS, Komisaris dan Direksi, Karyawan) kepada para *external stakeholders* lainnya, termasuk seluruh masyarakat melalui misi yang menjadikan perusahaan berkategori sehat, penciptaan lapangan kerja, serta nilai tambah bagi masyarakat di mana bisnis mendapatkan manfaat dari seluruh aktivitas.

2.4 Kerangka Pemikiran

2.4.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Good Corporate Governance*

Komite Audit memegang peranan cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance* (GCG) karena merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Menurut Arief Effendi (2016), untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi (*independency*), transparansi dan pengungkapan (*transparency and disclosure*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), serta kewajaran (*fairness*) harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit.

Komite Audit memiliki peran penting sebagai salah satu organ perusahaan yang mutlak harus ada dalam penerapan *Good Corporate Governance* untuk memayungi serta melakukan pendidikan dan pengakuan terhadap kualifikasi anggota komite audit dalam rangka mempercepat transformasi perusahaan menuju *Good Corporate Governance* menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI, 2007). Oleh karena itu peran komite audit erat kaitannya dengan GCG dan dapat dijadikan tolak ukur sukses bagi suatu perusahaan. Komite audit merupakan pilar penting dalam penerapan GCG, karena komite audit juga berperan dalam evaluasi laporan keuangan menurut Zakarsyi (2008:22).

Berdasarkan jurnal Dian Sita Aryanti (2012) mengenai peran komite audit dan audit internal dalam perwujudan *Good Corporate Governance* yang dilakukan kepada WKA, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komite audit memiliki peran

yang sangat signifikan bagi perusahaan. Karena komposisi komite audit pada Wijaya Karya (WIK) telah sesuai dengan peraturan menteri BUMN. Komite audit juga telah memiliki charter yang disusun oleh komite audit sendiri dengan bantuan konsultan independen yang memastikan kesesuaian isi charter dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, keberadaan komite audit di WIK telah memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chrisdianto (2013) mengenai Peran Komite Audit Dalam *Good Corporate Governance* dapat disimpulkan bahwa komite audit mampu memberikan peran yang besar dalam penerapan *good corporate governance*, mampu mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai pengembangan berkaitan dengan upaya-upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*.

2.4.2 Pengaruh Audit Internal Terhadap *Good Corporate Governance*

Audit Internal sebagai bagian yang memainkan peranan penting dalam mewujudkan terciptanya *good corporate governance* seperti, membantu direksi dan dewan komisaris dalam menyusun dan mengimplementasikan kriteria GCG sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membantu direksi dan dewan komisaris dalam menyediakan data keuangan dan operasi serta data lain yang dapat dipercaya, *accountable*, akurat, tepat waktu, obyektif, mudah dimengerti dan relevan bagi para *stakeholder* untuk pengambilan keputusan, memastikan bahwa seluruh elemen perusahaan dalam setiap aktivitasnya telah mengikuti ketentuan secara konsisten, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem audit yang baik, khususnya mendorong pembentukan komite audit yang ideal, merancang pedoman audit

internal, serta menumbuhkan efektifitas penggunaan dan pemanfaatan hasil kerja auditor independen menurut Hery (2017:292).

Menurut Arief Effendi (2016:99), auditor Internal dapat berperan dalam mendorong terwujudnya GCG di perusahaan. Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan penuh dari auditor internal, dengan mendorong transparansi (*transparency*) dan integritas (*integrity*) dalam pelaporan keuangan (*financial reporting*) perusahaan, mendorong akuntabilitas (*accountability*) dalam pengelolaan aset perusahaan, mendorong pertanggung jawaban (*responsibility*) perusahaan kepada publik melalui *corporate social responsibility* (CSR), *community development*, atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), mendorong independensi (*independency*) perusahaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemegang saham minoritas dan, mendorong kewajaran (*fairness*) dalam pengadaan barang dan jasa termasuk dipastikannya tidak ada pelanggaran terhadap UU antimonopoli dan persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan hasil penelitian Trimanto S. Wardoyo dan Lena (2010) mengenai peranan auditor internal dalam menunjang pelaksanaan *good corporate governance* menunjukkan bahwa auditor internal memiliki hubungan yang kuat terhadap GCG, karena pelaksanaan prinsip transparansi sudah cukup baik, untuk prinsip akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran sudah baik, sehingga perusahaan mempunyai pembagian tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewitasari (2009) mengenai pengaruh audit intern dan pengendalian intern terhadap penerapan *good corporate*

governance menyatakan bahwa audit intern (X1) berpengaruh positif terhadap penerapan GCG (Y) akan tetapi hasil tidak signifikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan GCG tidak seluruhnya di tentukan oleh audit intern yang dilaksanakan oleh auditor intern/satuan pengawasan internal (SPI), dewan komisaris, direksi serta pengendalian intern wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG

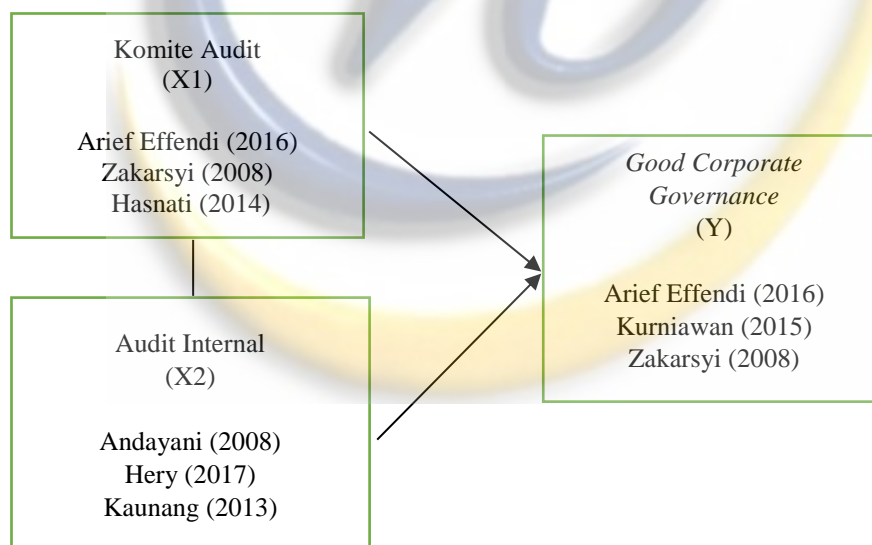
2.4.3 Pengaruh Komite Audit dan Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Zakarsyi (2008:29), Komite audit dan Audit Internal berperan penting dalam mewujudkan *good corporate governance*. Karena, Komite audit juga berperan dalam evaluasi laporan keuangan. Selain itu, Audit Internal juga sebagai bagian yang memainkan peranan penting dalam mewujudkan terciptanya *good corporate governance* seperti, membantu direksi dan dewan komisaris dalam menyusun dan mengimplementasikan kriteria GCG.

Berdasarkan jurnal Dian Sita Aryanti (2012), mengenai peran komite audit dan audit internal dalam perwujudan *Good Corporate Governance* yang dilakukan kepada WIKA, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komite audit memiliki peran yang sangat signifikan bagi perusahaan. Karena komposisi komite audit pada Wijaya Karya (WIK) telah sesuai dengan peraturan menteri BUMN. Komite audit juga telah memiliki charter yang disusun oleh komite audit sendiri dengan bantuan konsultan independen yang memastikan kesesuaian isi charter dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, keberadaan komite audit di WIK telah memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan jurnal Niken Anamukti, Pupung Purnamasari, dan Harlianto Utomo (2015), mengenai Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Komite Audit terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang dilakukan pada perusahaan BUMN di Kota Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Komite Audit memberikan pengaruh relatif besar terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perusahaan BUMN, ada keterikatan yang kuat antara variable Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Komite Audit terhadap variabel pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis 1 : Komite Audit berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance*

Hipotesis 2 : Audit Internal berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance*

Hipotesis 3 : Komite Audit dan Audit Internal berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance*



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pada dasarnya objek penelitian merupakan suatu hal yang hendak di teliti atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.

Menurut Sugiyono (2013), pengertian objek penelitian adalah:

"Objek penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya."

Menurut Nuryaman & Veronica (2015:5), pengertian objek penelitian adalah:

"Objek penelitian adalah karakteristik yang melekat pada subjek penelitian. Karakteristik ini jika diberikan nilai maka nilainya akan bervariasi (berbeda) antar individu satu dengan lainnya"

Objek dalam penelitian ini adalah Pengaruh Peranan Komite Audit dan Audit Internal Terhadap *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia untuk mendukung analisis mengenai objek yang diteliti. Maka objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah menitikberatkan pada masalah yang dibahas yaitu Pengaruh Peranan Komite Audit dan Audit Internal terhadap Good Corporate Governance. Sedangkan unit yang dianalisis, yaitu di PT. Pos Indonesia yang beralamat di Jl. Jakarta No.34 Bandung.

3.1.1 Sejarah Perusahaan

PT. Pos Indonesia (Persero) adalah salah satu dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Indonesia seperti halnya PT. PLN, PT. Kereta Api,

PT. Telkom dan lain sebagainya. Pentingnya komunikasi secara tertulis menjadi ide pertama timbulnya gagasan untuk mendirikan perusahaan ini. Selain itu, pendirian perusahaan juga bertujuan untuk menjamin keamanan surat-menyurat antar penduduk di seluruh daerah di Indonesia. Kantor Pos Indonesia pertama kali didirikan di Jakarta pada masa kolonial Belanda, pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron Van Inhoff dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Seiring dengan perkembangan peranan Kantor Pos, terlebih setelah ditemukannya teknologi telegraf dan telepon, pada tahun 1907 dibentuklah Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon (Jawatan PTT). Jawatan ini merupakan bagian dari departemen perusahaan-perusahaan pemerintah kolonial Belanda yang didasarkan pada Undang-Undang Perusahaan Negara Hindia Belanda.

3.1.2 Visi, Misi dan Tujuan PT. Pos Indonesia

1. Visi PT. Pos Indonesia

Pos Indonesia adalah penyedia jasa pos yang berbasis informasi dan bernilai tinggi bagi masyarakat di seluruh nusantara serta dapat berkompetisi dalam industri global.

2. Misi PT. Pos Indonesia

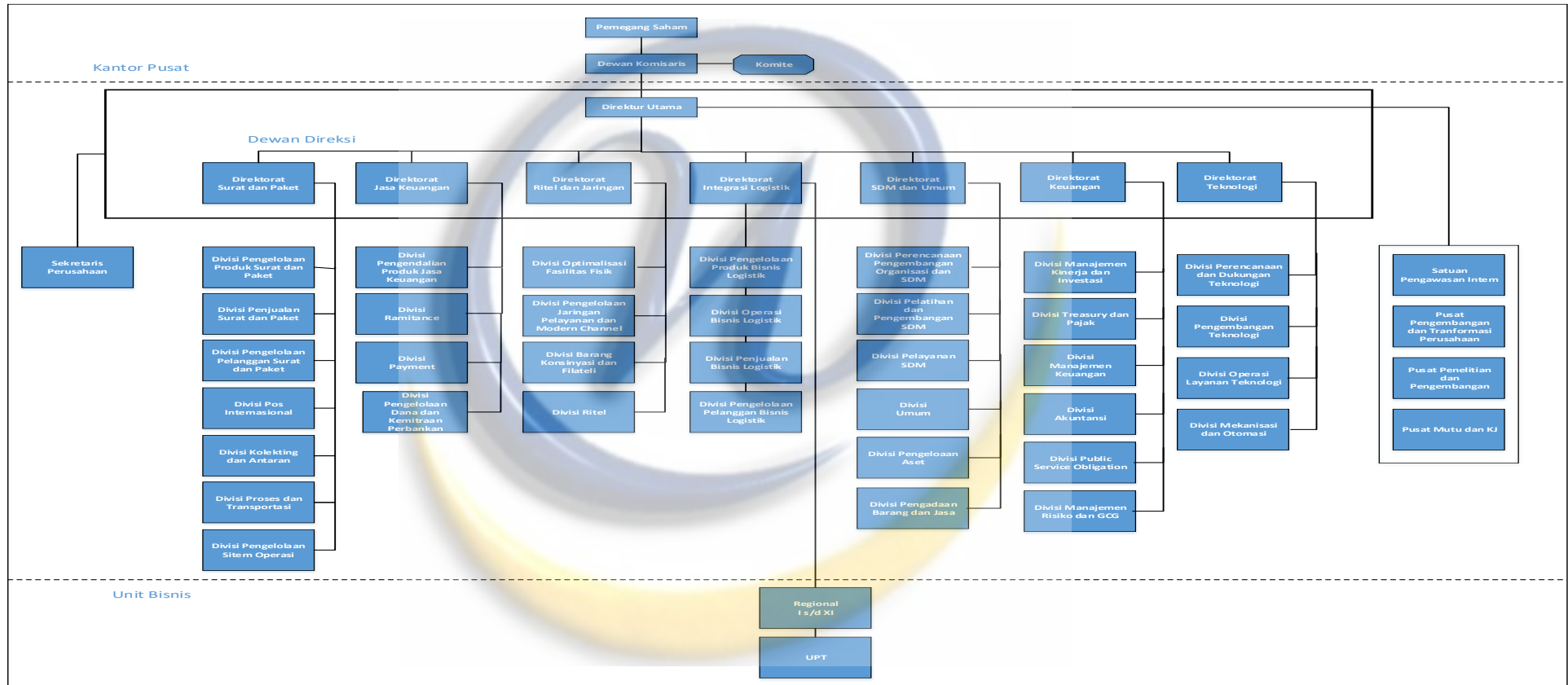
- 1) Menjadi aset yang berguna bagi bangsa dan negara.
- 2) Menjadi tempat berkarya yang menyenangkan.
- 3) Menjadi pilihan terbaik bagi para pelanggan.

- 4) Senantiasa berjuang untuk memberi yang lebih baik bagi bangsa, negara, pelanggan, karyawan, masyarakat serta pemegang saham.

3. Tujuan PT. Pos Indonesia

PT. Pos Indonesia mempunyai tujuan memastikan pengontrolan dapat dilakukan baik oleh pihak konsumen sendiri, pengontrolan ini memerlukan biaya investasi yang cukup besar dalam usaha memodernisasi dan tidak tergantung pada *Human Resources* yang terlalu besar. Namun *Turnover* yang akan diterima dipastikan akan lebih besar karena tujuan utama dari sistem ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya untuk membuat masyarakat Indonesia loyal menggunakan PT. Pos Indonesia.

3.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2012), Data yang diperoleh selama penelitian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *explanatory*. Penelitian *explanatory* adalah suatu metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan kausal antara variabel satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis.

Sedangkan menurut Nuryaman & Veronica (2015:6), definisi penelitian eksplanatori adalah sebagai berikut:

“Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang tujuannya untuk memperoleh jawaban tentang “bagaimana” dan “mengapa” suatu fenomena terjadi. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan atau membuktikan bagaimana hubungan antar variabel penelitian.”

Pengertian pendekatan studi kasus menurut Sekaran (2010), adalah sebagai berikut :

“Studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, dimana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini”

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis memberikan kuesioner kepada pihak-pihak yang menjadi subjek dari penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, kemudian data tersebut diolah untuk mengetahui persepsi atau opini atau pendapat dari pihak-pihak yang berhubungan berdasarkan kuesioner yang penulis berikan kepada responden.

3.2.1 Populasi dan Sampel

3.2.1.1 Populasi Penelitian

Pengertian Populasi menurut Sugiyono (2012), adalah:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”

Populasi yang digunakan dalam peneliti ini berjumlah 35 orang unit internal audit yang bekerja di PT. Pos Indonesia yang berlokasi di Jl. Jakarta No. 34, Bandung

3.2.1.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012), mendefinisikan sampel adalah sebagai berikut:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan sampel diambil dari populasi diharapkan harus betul-betul representative (mewakili) populasi”

Sementara menurut Nuryaman & Veronica (2015:101), menjelaskan pengertian sampel sebagai berikut :

“Sampel adalah bagian dari populasi, sampel berisi beberapa anggota yang dipilih dari populasi”

Populasi yang digunakan dalam peneliti ini berjumlah 35 orang unit internal audit yang bekerja di PT. Pos Indonesia yang berlokasi di Jl. Jakarta No. 34, Bandung.

Penelitian ini menggunakan teknik sampling non probability yaitu dengan metode sampling jenuh dimana seluruh populasi digunakan semua sebagai sampel, sehingga sampel yang diambil sebanyak 35 orang.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini, yaitu dengan cara:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer dengan mengadakan peninjauan langsung pada perusahaan yang dipilih menjadi lokasi penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data berhubungan dengan hal yang akan diteliti agar lebih meyakinkan dan lebih akurat. Studi lapangan ini dilakukan antara lain dengan cara :

- Kuesioner

Penelitian ini dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang hal-hal yang berhubungan dengan bidang yang diteliti dalam perusahaan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku wajib (literatur) dan referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan teori dan berbagai penjelasan mengenai masalah yang diteliti.

3.2.3 Sumber Data

1. Data primer

Menurut Sugiyono (2012), menyatakan bahwa :

“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, sedangkan data sekunder merupakan sumber

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”

Data yang diperoleh secara langsung dengan memberikan kuesioner pada PT. Pos Indonesia Bandung sebagai subjek penelitian.

2. Data sekunder

Menurut Husein (2009), Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung, data sekunder yaitu data yang sudah tersedia sebelumnya, diperoleh dari pihak-pihak lain yang berasal dari buku-buku, literature, artikel dan tulisan-tulisan ilmiah. Data yang diperoleh dari luar perusahaan berupa buku-buku, artikel, website, jurnal dan literatur yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3.3 Operasionalisasi Variabel

Menurut Nazir (2011), operasionalisasi variabel adalah sebagai berikut:

“Suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut”

Menurut Nuryaman & Veronica (2015:42), definisi variabel independen adalah sebagai berikut :

"Variabel independen sering disebut variabel bebas adalah variabel dependen. Dengan kata lain, perubahan nilai (*variance*) pada variabel independen dapat menyebabkan perubahan nilai variabel dependen".

Adapun definisi variabel dependen menurut Nuryaman & Veronica (2015:42) adalah :

"Variabel dependen sering disebut variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dengan kata lain, besaran nilai variabel dependen dipengaruhi oleh perubahan variabel independen"

- **Variabel Bebas (Independen Variabel)**

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini ada dua, pertama (X_1) adalah komite audit dan kedua (X_2) adalah audit internal.

A) Komite Audit (X_1)

Suatu Komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi atas pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* yang dikeluarkan oleh IKAI (2016)

B) Auditor Internal (X_2)

Variabel auditor internal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrument yang di kembangkan oleh Hery (2017:265), yang diukur dengan empat indikator yaitu: Independensi, Kemampuan Profesional, Lingkup Pekerjaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan.

- **Variabel Terikat (Dependen Variabel)**

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat.

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas menurut Sugiyono (2013), Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengaruh Peran Komite Audit dan Audit Internal Terhadap *Good Corporate Governance (GCG)*. Selengkapnya mengenai operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala	Instrumen	Item
Variabel Independen (X1): Peran Komite Audit	Suatu Komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi atas pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari <i>corporate governance</i> . (Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) 2016)	1. Tanggung jawab komite audit terhadap laporan keuangan	Interval	Kuesioner	1-2
		2. Tanggung jawab komite audit terhadap tata kelola perusahaan			3-4
		3. Tanggung jawab komite audit terhadap pengawasan perusahaan			5-6

Lanjutan Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala	Instrumen	Item
Variabel Independen (X2): Audit Internal	Audit Internal adalah aktivitas independen, penilaian objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan. <i>(The Institute of Internal auditors (IIA) (2011:2))</i>	1. Independensi	Interval	Kuesioner	7-8
		2. Kemampuan Profesional			9-10
		3. Lingkup Pekerjaan			11-12
		4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan			13-14
Variabel Dependen (Y): Good Corporate Governance	<i>Corporate Governance</i> adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang. <i>(Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.PER-01/MBU/2011)</i>	1. Transparansi <i>(Transparency)</i>	Interval	Kuesioner	15-16
		2. Akuntabilitas <i>(Accountability)</i>			17-18
		3. Pertanggung jawaban <i>(Responsibility)</i>			19-20
		4. Kemandirian <i>(Independence)</i>			21-22
		5. Kewajaran <i>(Fairness)</i>			23-24

3.3.1 Pengukuran Variabel

Alat Ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Penulis mengambil kuesioner untuk variabel (X1) “Komite Audit” diadopsi dari *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI). Penulis mengambil kuesioner untuk variabel (X2) “Audit Internal” diadopsi dari *The Institute of Internal auditors* (IIA) (2011:2) dan Penulis mengambil kuesioner untuk variabel (Y) “*Good Corporate Governance*” diadopsi dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.PER-01/MBU/2011)

3.3.2 Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisa data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kuantitatif dimana merupakan suatu bentuk analisis yang diperuntukkan bagi data yang besar yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-angka.

3.3.3 Teknik Pengembangan Instrumen

Instrumen dalam penelitian ini adalah alat yang dipakai untuk menghimpun data. Data yang diharapkan dalam penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner, Menurut Sukrisno Arikunto (2006:15) :

“Angket atau kuesioner adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien karena peneliti mengetahui dengan pasti variable yang akan diukur dan apa yang diharapkan dari responden”

Kuesioner yang akan digunakan penulis dalam pengumpulan data terdiri dari dua bagian yaitu:

1) Pertanyaan umum

Pertanyaan umum menyangkut identitas responden dengan menggunakan metode-metode pertanyaan terbuka, dimana jawaban responden tidak ditentukan lebih dahulu melainkan bebas untuk member jawaban.

2) Pertanyaan Khusus

Pertanyaan khusus dalam hal ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kinerja auditor internal. Setiap item pertanyaan akan diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan yang diajukan menurut Sugiyono (2012), skala Likert yaitu:

“Skala Likert adalah digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Biasanya format skala likert merupakan perpaduan antara kesetujuan dan ketidaksetujuan, skala ini dikembangkan oleh Rensis Likert sehingga dikenal dengan Skala Likert.”

Skala Likert menggunakan 5 (lima) tingkatan untuk menyatakan sikap atau jawaban responden sebagai berikut :

Tabel 3.2 Instrumen Skala Likert

Alternatif Jawaban		Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2012:133)

Data dalam penelitian ini memiliki kedudukan yang sangat penting, karena merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai pembuktian hipotesis. Menurut Sukrisno Arikunto (2002:144), kuesioner sebagai instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan *reliable*. Instrumen yang valid dan *reliable* merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan *reliable*. Hasil penelitian dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Selanjutnya hasil penelitian dikatakan *reliable* apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda.

3.3.4 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Dalam penelitian, data memiliki kedudukan yang sangat penting karena data merupakan variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Oleh karena itu, bila instrumen/alat ukur tersebut tidak valid maupun reliabel, maka tidak akan diperoleh hasil penelitian yang baik. Apabila kuesioner sebagai alat ukur atau alat pengumpul informasi, maka belum berarti dapat langsung digunakan

kecuali kuesioner telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Kuesioner dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian karena syarat instrumen yang baik harus memenuhi unsur-unsur akurasi, presisi, dan peka menurut Noor (2011).

3.3.4.1 Pengujian Validitas Instrumen

Menurut Edison (2016:41), Validitas adalah pengujian terhadap instrument data yang ditujukan untuk mengukur apakah data valid atau tidak. Esensi dari validitas berkaitan dengan apakah pertanyaan yang diajukan kepada responden sesuai dengan tujuan yang mencerminkan keadaan empirisnya dan apakah pertanyaan benar-benar menyangkut isi dan makna yang ditanyakan, alat pengukur yang absah akan mempunyai validitas yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

Validitas alat ukur atau instrumen penelitian diukur dengan cara dicari nilai (harga) korelasi terlebih dahulu dengan menggunakan Rumus Koefisien Korelasi Product Moments Pearson sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma x \Sigma y)}{\sqrt{(n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2) \times (n \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2)}}$$

Keterangan:

- r = Koefisien korelasi
- n = Jumlah responden
- Y = Jumlah skor tiap item X_i

Setelah nilai korelasi (r) didapat, kemudian dihitung nilai t_{hitung} untuk menguji tingkat validitas alat ukur penelitian dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah responden

Setelah nilai t_{hitung} diperoleh, langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai t_{hitung} tersebut dengan nilai t_{tabel} pada taraf signifikan sebesar $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan (dk) = $n - 2$. Kaidah keputusannya adalah:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah valid.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah tidak valid

Sumber : (Arikunto, 2002 : 146)

Uji validitas dilakukan terhadap alat ukur berupa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel komite audit, audit internal dan *good corporate governance*. Uji validitas terhadap item-item pernyataan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan alat pengolah data *software* SPSS.

Penelitian ini menggunakan skala pengukuran untuk uji validitas dengan cara membandingkan r_{hitung} atau nilai yang dihasilkan pada uji reabilitas yaitu pada kolom Correlation Item-Total Correlation dengan nilai yang dihasilkan r_{tabel} . Berdasarkan perbandingan antara r_{hitung} dan r_{tabel} maka terbentuklah hipotesis, sebagai berikut:

H_0 : $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid.

H_a : $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan pada kuesioner dinyatakan tidak valid.

3.3.4.2 Pengujian Reliabilitas Instrumen

Menurut Edison (2016:42), Pengujian reliabilitas adalah pengujian terhadap instrument data untuk mengukur apakah pertanyaan yang diajukan reliabel artinya pertanyaan yang diajukan kepada responden tepat pada yang dituju, pengujian reliabilitas atau keandalan alat ukur atau instrument dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Alpha Cronbach*. Koefisien keandalan menunjukkan mutu seluruh proses pengumpulan data suatu penelitian. Koefisien *Alpha Cronbach* ditunjukkan dengan:

$$Alpha (\alpha) = \frac{k \cdot \bar{r}}{1 + (k - 1) \cdot \bar{r}}$$

Keterangan:

k = Jumlah variabel manifest yang membentuk variabel laten

\bar{r} = Rata-rata korelasi antar variabel manifes

Tujuan perhitungan koefisien keandalan adalah untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden. Besarnya koefisien ini berkisar dari nol hingga satu. Makin besar nilai koefisien, makin tinggi keandalan alat ukur dan tingkat konsistensi jawaban.

- Jika $r < 0,20$ maka tingkat keandalan sangat lemah atau tingkat keandalan tidak berarti.
- Jika r diantara $0,20 - 0,40$ maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang rendah tetapi pasti.
- Jika r diantara $0,40 - 0,70$ maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang cukup berarti.

- Jika r diantara 0,70 – 0,80 maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang tinggi.
- Jika $r > 0,80$ maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang sangat tinggi.

Uji reliabilitas dilakukan terhadap alat ukur berupa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel komite audit, audit internal dan *good corporate governance*. Uji reliabilitas terhadap variabel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan alat pengolah data *software* SPSS.

3.4 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang *BLUE* (*Best Linier Unbiased Estimated*). Pengujian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

a) Uji Normalitas

Menurut Edison (2016:70), uji normalitas dimaksudkan untuk melakukan pengujian terhadap data yang digunakan dalam analisis regresi pada statistik parametrik mengharuskan data berdistribusi normal. Pemahaman data berdistribusi yakni data menyebar dialam semesta yang memiliki sifat, jenis, karakter, ukuran, nilai, bentuk. Jenis distribusi data sebagai berikut :

1. Data berdistribusi tidak normal

Data yang memiliki sifat, jenis, karakter, ukuran, nilai, bentuk yang jumlahnya sangat terbatas dan dapat dihitung.

2. Data berdistribusi normal

Data yang memiliki sifat, jenis, karakter, ukuran, nilai, bentuk yang jumlahnya tidak terbatas dan tidak dapat dihitung dengan cepat.

b) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Edison (2016:85), uji heteroskedastisitas dilakukan pada analisis regresi berganda. Maksud dan tujuan pengujian heteroskedastisitas adalah asumsi dalam regresi berganda, varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak sama. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain sama atau tetap maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi Homoskedastisitas.

Pengujian adanya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Gletjer, uji Park, uji White. Pengujian yang sering dan mudah dilakukan adalah dengan uji *Scatterplots* yakni dengan melihat penyebaran varians residul pada gambar *Scatterplots*.

c) Uji Multikolinearitas

Menurut Edison (2016:77), uji multikolinearitas dilakukan pada analisis regresi berganda. Maksud dan tujuan pengujian multikolinearitas adalah pengujian terhadap korelasi diantara variabel independen. Pada analisis regresi berganda harus dipenuhi syarat bahwa antara variabel independen tidak boleh terjadi korelasi yang signifikan, artinya nilai-nilai pada antara variabel independen berhubungan satu dengan yang lainnya, jika terjadi nilai yang saling berhubungan, maka masing-masing variabel prodiktor (X) tidak dapat memprediksi secara langsung (linier) pada variabel yang diprediksinya (Y).

Pengukuran ada tidaknya gejala multikolinearitas dengan melihat nilai *Variance Inflating Factor* (VIF), jika nilai $VIF > 10$, maka terjadi gejala multikolinearitas. Jika terjadi gejala multikolinearitas, maka salah satu variabel

harus dikeluarkan dari model regresi dengan menggunakan model regresi Stepwise, Forward, dan Backward.

Terjadinya gejala multikolinearitas didasarkan pada ketentuan :

- Nilai VIF < 10 menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel independen
- Nilai VIF > 10 menunjukkan terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel independen.

Pengukuran ada tidaknya gejala multikolinearitas dengan melihat nilai koefisien korelasi (bukan koefisien korelasi Pearson), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Variabel independen dengan variabel dependen tidak boleh menunjukkan adanya korelasi, jika terjadi korelasi, maka antara variabel independen dengan variabel dependen terjadi gejala multikolinearitas, artinya asumsi kolineritas tidak terpenuhi dalam analisis regresi.
- Nilai korelasi variabel independen dengan variabel dependen mendekati nilai 0 atau negatif yang artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2013) analisis linier regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/diturunkan.

Penjelasan regresi menurut Supangat (2007) yaitu:

“Garis regresi (*regression line/ line of the best fit/ estimating line*) adalah suatu garis yang ditarik diantara titik-titik (*scatter diagram*) sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu

berdasarkan variabel yang lain, dan dapat juga dipergunakan untuk mengetahui macam kolerasinya (positif atau negatifnya)”

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh peran komite audit dan audit internal terhadap penerapan *good corporate governance* di PT. Pos Indonesia.

Analisa regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X1 dan X2) Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon$$

Sumber: Sugiyono (2013)

Dimana:

Y = Nilai taksiran variabel *Good Corporate Governance*

a = Bilangan berkonstanta

b1,b2 = Koefisien arah garis

X1 = Variabel Bebas (Komite Audit)

X2 = Variabel Bebas (Audit Internal)

ϵ = Tingkat Error

3.5.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel

dependen amat terbatas. Menurut Ghozali (2011) Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai dugaan atas jawaban sementara mengenai suatu masalah yang masih perlu diuji secara empiris untuk mengetahui apakah pernyataan atau dugaan jawaban itu dapat diterima atau tidak. Uji pengaruh simultan (*F-test*), uji pengaruh parsial (*T-test*), dan uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti Sugiyono (2013).

1. Uji Parsial (*T-test*)

Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji T adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan Uji T adalah sebagai berikut:

1) Menentukan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$

Tingkat signifikan 0.05% atau 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

2) Menghitung Uji T

$$T_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

r : Koefisien korelasi

n : Jumlah sampel

3) Kriteria pengambilan keputusan

- a. H_0 ditolak jika t statistik $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$
- b. H_0 diterima jika t statistic $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$

nilai t_{tabel} didapat dari : $df = n-k-1$

Keterangan :

n : Jumlah observasi

k : Variabel independen

2. Uji Simultan (*F-test*)

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan Uji F adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$

Tingkat signifikan 0.05% atau 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

- 2) Menghitung Uji F (*F-Test*)

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi gabungan

K = Jumlah variabel independen

N = Jumlah sampel

3. Kriteria Pengambilan Keputusan

a. H_0 ditolak jika F statistik $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$

b. H_0 tidak berhasil ditolak jika F statistik $< 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$

nilai F_{tabel} didapat dari :

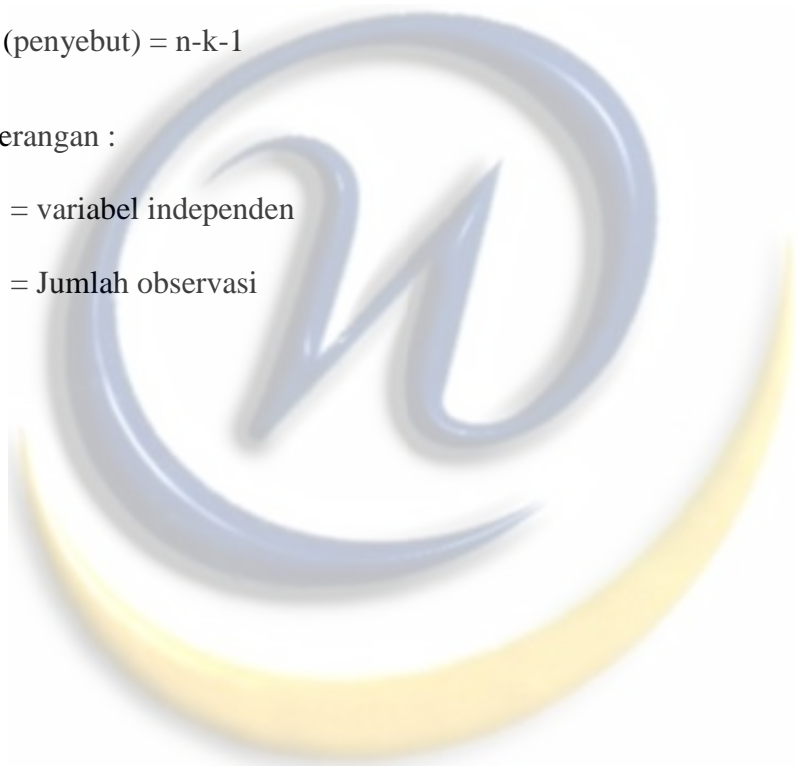
df1 (pembilang) = jumlah variabel independen

df2 (penyebut) = $n - k - 1$

Keterangan :

k = variabel independen

n = Jumlah observasi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil Penelitian data dan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan satuan pengawas intern (SPI) yang bekerja di PT. Pos Indonesia sebagai sumber data utama. Kuesioner disebarkan kepada 35 orang responden yang terdiri dari 24 item pernyataan yang diuraikan berdasarkan variabel yang akan diteliti yaitu Pengaruh Peran Komite Audit dan Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*.

4.1.1 Gambaran Umum Responden

Penulis pada sub ini akan menguraikan data hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti. Data yang diperoleh harus diolah terlebih dahulu agar dapat dianalisis dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Hasil pengolahan data dan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan auditor di PT. Pos Indonesia sebagai sumber data utama. Kuesioner disebarkan kepada 35 orang responden yang terdiri dari 24 item pernyataan yang diuraikan berdasarkan variabel yang akan diteliti yaitu pengaruh peran komite audit dan audit internal terhadap *Good Corporate Governance*.

Penjelasan mengenai latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel deskripsi profil responden. Deskripsi profil responden terdiri dari: jabatan pekerjaan, usia, jenjang pendidikan, lama bekerja.

Adapun data yang penulis peroleh mengenai profil responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kelompok Responden Berdasarkan Jabatan Pekerjaan

Jabatan Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Auditor	35	100,0%
Jumlah	35	100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jabatan pekerjaan pada PT. Pos Indonesia di Kota Bandung diduduki oleh Auditor.

Tabel 4.4 Kelompok Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
<25 Tahun	0	0,0%
25 - 30 Tahun	4	11,4%
30 - 40 Tahun	4	11,4%
>40 Tahun	27	77,1%
Jumlah	35	100%

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa auditor pada PT. Pos Indonesia di Kota Bandung berada pada usia yang produktif sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan.

Tabel 4.5 Kelompok Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Diploma	2	5,7%
Strata 1	27	77,1%
Strata 2	4	11,4%
Lain-lain	2	5,7%
Jumlah	35	100%

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa sebagian besar auditor di PT. Pos Indonesia Kota Bandung memiliki pendidikan terakhir strata S-1 sehingga memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Tabel 4.6 Kelompok Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase
<3 Tahun	0	0,0%
3-5 Tahun	4	11,4%
5-10 Tahun	28	80,0%
>10 Tahun	3	8,6%
Jumlah	35	100%

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa ukuran untuk lama bekerja pada PT. Pos Indonesia Kota Bandung yaitu kurang lebih 5-10 Tahun.

4.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Data yang dianalisis sebelumnya harus dilakukan beberapa pengujian, yang diantaranya adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian tersebut dimaksudkan untuk menguji setiap item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian tersebut, apakah konstan, stabil, dan mampu mengukur apa yang akan di ukur.

a) Hasil Pengujian Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk melihat valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor total butir pernyataan, apabila koefisien korelasinya lebih besar atau sama dengan 0,30 maka pernyataan tersebut

dinyatakan valid. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan korelasi *pearson product moment* (r) diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas

Variabel	No.P	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Komite Audit	1	0,824	0,300	Valid
	2	0,672	0,300	Valid
	3	0,731	0,300	Valid
	4	0,756	0,300	Valid
	5	0,539	0,300	Valid
	6	0,748	0,300	Valid
Audit Internal	7	0,757	0,300	Valid
	8	0,866	0,300	Valid
	9	0,856	0,300	Valid
	10	0,897	0,300	Valid
	11	0,919	0,300	Valid
	12	0,873	0,300	Valid
	13	0,550	0,300	Valid
	14	0,687	0,300	Valid
GCG	15	0,673	0,300	Valid
	16	0,423	0,300	Valid
	17	0,614	0,300	Valid
	18	0,702	0,300	Valid
	19	0,493	0,300	Valid
	20	0,556	0,300	Valid
	21	0,557	0,300	Valid
	22	0,550	0,300	Valid
	23	0,508	0,300	Valid
	24	0,320	0,300	Valid

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien validitas dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0,30. Hasil pengujian ini menunjukkan

bahwa semua butir pernyataan untuk kedua variabel sudah valid dan layak dijadikan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

b) Hasil Pengujian Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner dapat diandalkan, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas dan apabila koefisien reliabilitasnya lebih besar dari 0,60 maka secara keseluruhan pernyataan tersebut dinyatakan andal (reliabel). Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode *Alpha Cronbach's* diperoleh hasil uji reliabilitas kuesioner masing-masing variabel sebagai berikut.

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Titik Kritis	Kesimpulan
Komite Audit	0,805	0,700	Reliabel
Audit Internal	0,922		Reliabel
GCG	0,727		Reliabel

Pada tabel 4.8 di atas terlihat bahwa nilai reliabilitas masing-masing sebesar variabel (*Alpha Cronbach's*) lebih besar dari nilai kritis 0,700. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel sudah memberikan hasil yang konsisten.

4.1.3 Analisis Deskriptif

Bagian ini akan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian, selain upaya perolehan data studi pustaka untuk melengkapi data utama. Kuesioner terdiri dari 24 butir pertanyaan dengan perincian 6 butir pertanyaan mengenai komite audit, 8 butir pertanyaan mengenai audit internal, 10 butir pertanyaan mengenai *good corporate governance*.

Bobot dari setiap jawaban yang diberikan responden akan diberikan skor (nilai) pada setiap jawaban yaitu untuk pertanyaan positif diberikan skor 5-4-3-2-1 dan untuk pertanyaan negatif diberi skor 1-2-3-4-5. Pertanyaan positif berupa hal yang diindikasikan baik untuk responden dan pertanyaan negatif mengindikasikan hal yang tidak baik untuk responden.

Analisis deskriptif bertujuan untuk melihat gambaran hasil penelitian dengan sampel penelitian sebanyak 35 responden. Sedangkan untuk melihat penilaian responden terhadap setiap variabel yang diteliti dapat dilihat dari nilai skor aktual dan rata-rata yang diperoleh, dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebanyak 5 kategori sesuai banyaknya opsi jawaban pada setiap item pernyataan. Rumus yang digunakan menurut Sugiono (2013:134) sebagai berikut:

Tabel 4.9 Pedoman Kategorisasi Rata-Rata Skor Tanggapan Responden

Rentang	Kategori
1,00 – 1,79	Sangat Tidak Baik
1,80 – 2,59	Tidak Baik
2,60 – 3,39	Cukup Baik
3,40 – 4,19	Baik
4,20 – 5,00	Sangat Baik

Sumber: Sugiono (2013:134)

4.1.3.1 Gambaran Mengenai Komite Audit

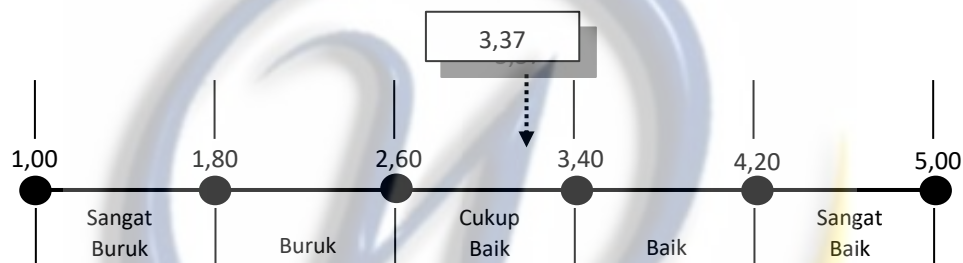
Tabel 4.10 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Komite Audit

No	Pernyataan	JAWABAN RESPONDEN					TOTAL	SKOR AKTUAL	RATA-RATA
		SL	SR	KK	JR	TP			
Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan									
1	Komite Audit memiliki tanggung jawab terhadap meneliti dan menelaah laporan keuangan tahunan	1	18	10	6	0	35	119	3,40
2	Selama ini Komite Audit selalu melakukan tanggung jawab pengawasan terhadap hasil audit	0	27	4	4	0	35	128	3,66
Tanggung Jawab Atas Tata Kelola Perusahaan									
3	Komite Audit selalu memastikan untuk melaporkan hasil pemeriksaan <i>Corporate Governance</i> dan temuan penting lainnya	0	18	11	6	0	35	117	3,34
4	Selama ini Komite Audit selalu memberikan penilaian terhadap kebijakan perusahaan	0	21	8	6	0	35	120	3,43

Lanjutan Tabel 4.10 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Komite Audit

Tanggung Jawab Atas Pengawasan Perusahaan									
5	Selama ini Komite Audit memahami tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko	0	13	14	8	0	35	110	3.14
6	Komite audit di tempat bapak/ibu bekerja selalu memonitor hasil pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.	1	17	7	10	0	35	114	3.26
Total		2	114	54	40	0	210	708	3.37
Kategori								Cukup Baik	

Sumber :data olah hasil kuisisioner 2017 (terlampir)



Gambar 4.3 Garis Kontinum Komite Audit

Tabel 4.10 dan Gambar 4.3 di atas menunjukkan tanggapan responden mengenai variabel Komite audit. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,37. Angka tersebut berada pada interval 2,60 – 3,40 dan termasuk dalam kategori cukup baik. Skor tertinggi ada pada pernyataan No. 2 dengan rata-rata 3,66 yang menyatakan bahwa Komite Audit pada PT. Pos Indonesia selalu melakukan tanggung jawab pengawasan terhadap hasil audit, dan skor terendah ada pada pernyataan No. 5 dengan rata-rata 3,14 yang menyatakan bahwa Komite Audit pada PT. Pos Indonesia belum mampu memahami tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko.

4.1.3.2 Gambaran Mengenai Audit Internal

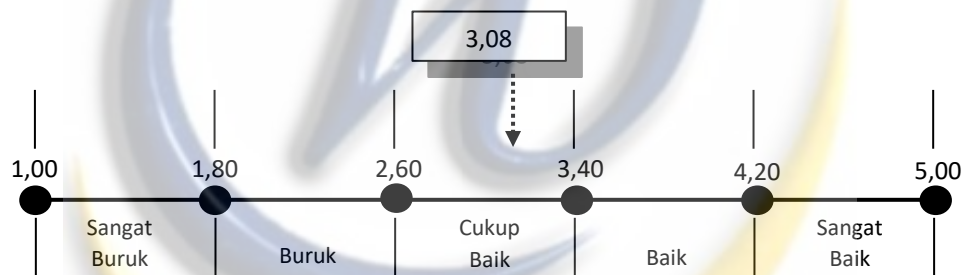
Tabel 4.11 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Audit Internal

No	Pernyataan	JAWABAN RESPONDEN					TOTAL	SKOR AKTUAL	RATA-RATA
		SL	SR	KK	JR	TP			
Independensi									
7	Bapak/ibu berkomunikasi untuk memperoleh informasi pada bagian yang sedang diaudit	2	4	26	3	0	35	110	3,14
8	Bapak/ibu bersikap tidak memihak (objektif) dalam melakukan tugas audit	2	2	28	3	0	35	108	3,09
Kemampuan Profesional									
9	Bapak/ibu memiliki latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja dalam bidang audit untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat	2	4	25	4	0	35	109	3,11
10	Selama ini bapak/ibu mengikuti pendidikan keahlian dibidang Audit Internal yang diselenggarakan oleh YPIA (yayasan pendidikan internal audit) dan institusi lain yang meningkatkan keahliannya	2	3	26	4	0	35	108	3,09
Lingkup Pekerjaan									
11	Selama ini pelaksanaan audit yang dilaksanakan bapak/ibu didasarkan pada program yang telah disusun sebelumnya	2	2	30	1	0	35	110	3,14
12	Bapak/ibu dalam melaksanakan audit melakukan evaluasi terhadap risiko yang berkaitan dengan system informasi, efektifitas, dan efisiensi operasi, kesesuaian terhadap hukum undang-undang dan keamanan aset	2	2	27	4	0	35	107	3,06

Lanjutan Tabel 4.11 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Audit Internal

Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan									
13	Bapak/ibu selalu melaksanakan aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan	1	2	29	3	0	35	106	3,03
14	Bapak/ibu memiliki perencanaan yang baik setiap akan melakukan pemeriksaan sehingga risiko dapat diprediksi	1	1	29	4	0	35	104	2,97
Total		14	20	220	26	0	280	862	3,08
Kategori								Cukup Baik	

Sumber :data olah hasil kuisioner 2017 (terlampir)



Gambar 4.4 Garis Kontinum Audit Internal

Tabel 4.11 dan Gambar 4.4 di atas menunjukkan tanggapan responden mengenai variabel Audit internal. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,08. Angka tersebut berada pada interval 2,60 – 3,40 dan termasuk dalam kategori cukup baik. Skor tertinggi ada pada pernyataan No. 7 dan 11 dengan rata-rata 3,14 yang menyatakan bahwa auditor selalu berkomunikasi untuk memperoleh informasi serta pelaksanaan audit yang dilakukan selalu didasarkan pada program yang telah disusun sebelumnya. Dan untuk skor terendah ada pada pernyataan No. 14 dengan

rata-rata 2,97 yang menyatakan bahwa belum ada perencanaan yang baik setiap akan melakukan pemeriksaan.

4.1.3.3 Gambaran Mengenai Good Corporate Governance

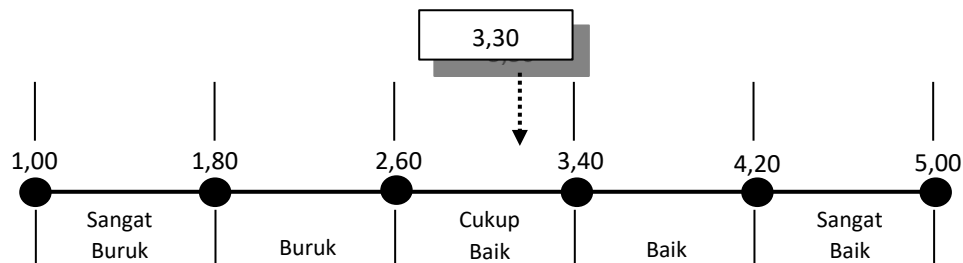
Tabel 4.12 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Good Corporate Governance

No	Pernyataan	JAWABAN RESPONDEN					TOTAL	SKOR AKTUAL	RATA-RATA
		SL	SR	KK	JR	TP			
Transparansi									
15	Informasi yang dihasilkan oleh perusahaan tempat bapak/ibu bekerja sudah jelas, lengkap, mudah dimengerti oleh pihak yang membutuhkan khususnya pemegang saham atau <i>stakeholder</i> .	2	8	22	3	0	35	114	3,26
16	Informasi yang disediakan oleh perusahaan dimana tempat bapak/ibu bekerja sudah jelas dan dapat menggambarkan keadaan perusahaan dengan baik	1	13	19	2	0	35	118	3,37
Akuntabilitas									
17	Setiap karyawan perusahaan tempat bapak/ibu bekerja memiliki kemampuan yang sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya	1	12	17	5	0	35	114	3,26
18	Bapak/ibu bekerja secara rinci dan bertanggung jawab pada perusahaan	0	9	20	6	0	35	108	3,09
Kemandirian									
19	Selama ini perusahaan tempat bapak/ibu bekerja bebas dari benturan kepentingan dari segala pengaruh dan tekanan	1	13	20	1	0	35	119	3,40
20	Selama ini perusahaan tempat bapak/ibu bekerja terhindar dari tekanan dari pihak manapun	1	10	20	4	0	35	113	3,23

Lanjutan Tabel 4.12 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai *Good Corporate Governance*

Pertanggung Jawaban									
21	Perusahaan tempat bapak/ibu bekerja sudah patuh terhadap Undang-undang Badan Usaha Milik Negara	1	14	13	7	0	35	114	3,26
22	Bapak/ibu sudah patuh terhadap peraturan-peraturan perusahaan dalam bekerja	0	21	11	3	0	35	123	3,51
Kewajaran									
23	Perusahaan tempat bapak/ibu bekerja selalu memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada <i>stakeholder</i> sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan	0	11	21	3	0	35	113	3,23
24	Adanya kebijakan kompensasi positif (penghargaan atau insentif) terhadap keberhasilan karyawan atau negatif (hukuman atau teguran) terhadap kinerja yang buruk dari perusahaan tempat bapak/ibu bekerja	0	18	12	5	0	35	118	3,37
Total		7	129	175	39	0	350	1154	3,30
Kategori								Cukup Baik	

Sumber :data olah hasil kuisisioner 2017 (terlampir)



Gambar 4.5 Garis Kontinum *Good Corporate Governance*

Tabel 4.12 dan Gambar 4.5 di atas menunjukkan tanggapan responden mengenai variabel *Good Corporate Governance*. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,30. Angka tersebut berada pada interval 2,60 – 3,40 dan termasuk dalam kategori cukup baik. Skor tertinggi ada pada pernyataan No. 22 dengan rata-rata 3,51 yang menyatakan bahwa auditor pada PT. Pos Indonesia sudah patuh terhadap peraturan-peraturan perusahaan dalam bekerja, namun skor terendah ada pada pernyataan No. 18 dengan rata-rata 3,09 yang menyatakan bahwa auditor belum bekerja secara rinci dan bertanggung jawab pada perusahaan.

4.1.4 Analisis Verifikatif

4.1.4.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang *BLUE* (*Best Linier Unbiased Estimated*). Pengujian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah data yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan menggunakan analisis *kolmogorov smirnov* dan analisis grafik *normal probability plot*. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *asympt sig.* pada uji *kolmogorov smirnov* jika lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan normal.

Berikut uji hasil normalitas dengan menggunakan aplikasi *Software SPSS 21 for window*.

**Tabel 4.13 Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,99471144
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,072
	Negative	-,073
Kolmogorov-Smirnov Z		,432
Asymp. Sig. (2-tailed)		,992

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,992 dan lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

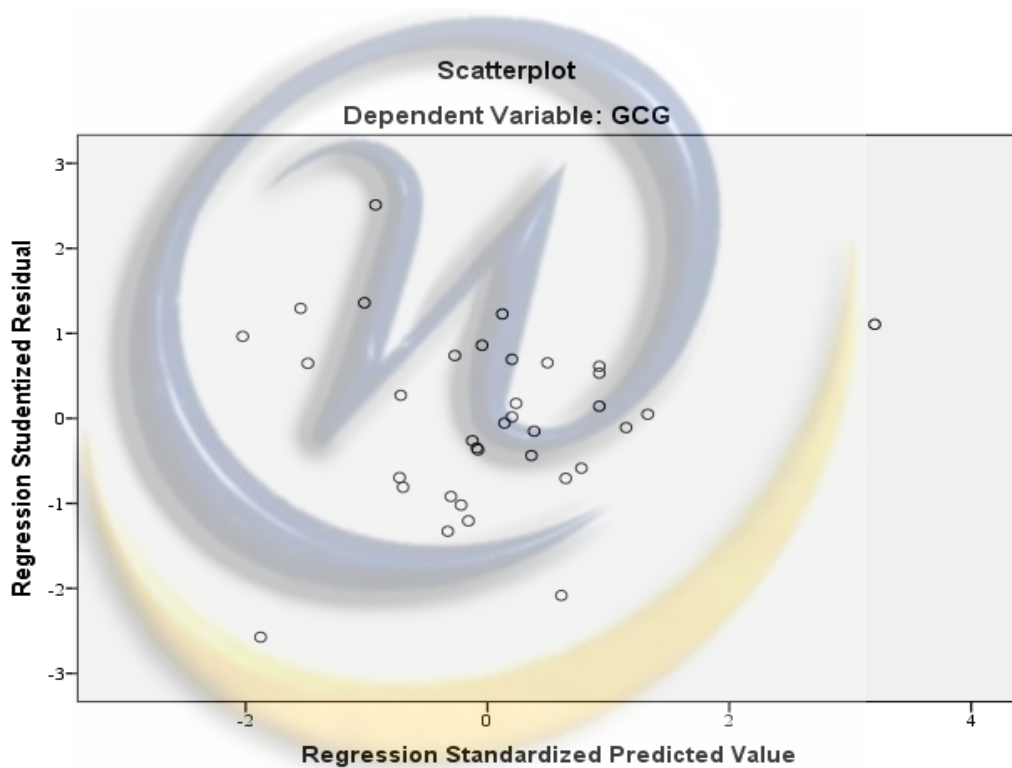
b) Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas

- Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Berikut ini dilampirkan grafik *scatterplot* untuk menganalisis apakah terjadi heterokedaktisitas atau terjadi heterokedaktisitas, adapun alat pengujian yang digunakan oleh penulis adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (SDRESID) dengan residualnya (ZPRED).



Gambar 4.6 Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi.

c) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu dengan melihat angka VIF (*Variance Inflation Factor*) harus kurang dari 10 dan angka *tolerance* lebih dari 0,1.

Tabel 4.14 Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Komite Audit	,982	1,018
	Audit Internal	,982	1,018

a. Dependent Variable: GCG

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel di atas, nilai *tolerance* untuk seluruh variabel bebas > 0,1 dan nilai VIF seluruh variabel bebas < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data tersebut.

4.1.4.2 Analisis Pengaruh Komite Audit, dan Audit Internal Terhadap *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia

a) Analisis Persamaan Regresi (*Multiple Regression*)

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuat estimasi koefisien-koefisien persamaan linier, mencakup satu atau dua variabel bebas yang dapat digunakan secara tepat untuk memprediksi nilai variabel terikat.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Nilai taksiran variabel *Good Corporate Governance*

a = Konstanta

X₁ = Komite audit

X₂ = Audit internal

b₁,b₂,b₃= Koefisien Regresi

€ = Tingkat Error

Dengan menggunakan *software* SPSS 21, diperoleh hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Estimasi Persamaan Regresi
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,610	3,126		2,115	,042
	Komite Audit	,890	,145	,671	6,141	,000
	Audit Internal	,349	,112	,339	3,101	,004

a. Dependent Variable: GCG

Dari perhitungan regresi yang telah diolah di atas, maka diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = 6,610 + 0,890 X_1 + 0,349 X_2$$

Koefisien yang terdapat pada persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

b₀= 6,610

Artinya jika kedua variabel bebas (komite audit dan audit internal) bernilai konstan (nol) maka diasumsikan *Good Corporate Governance* akan bernilai sebesar 6,610.

$b_1 = 0,890$ Artinya jika komite audit meningkat dan variabel bebas lainnya konstan, maka diprediksikan akan meningkatkan *Good Corporate Governance* sebesar 0,890.

$b_2 = 0,349$ Artinya jika Audit internal meningkat dan variabel bebas lainnya konstan, maka diprediksikan akan meningkatkan *Good Corporate Governance* sebesar 0,349.

b) Analisis Korelasi Simultan

Analisis korelasi berfungsi untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Berdasarkan pengolahan SPSS maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.16 Koefisien Korelasi Simultan
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,791 ^a	,625	,602	3,086878

a. Predictors: (Constant), Audit Internal, Komite Audit

b. Dependent Variable: GCG

Nilai R sebesar 0,791 pada output di atas menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel independen (komite audit dan audit internal) secara simultan dengan *Good Corporate Governance*. Nilai korelasi sebesar 0,791 jika mengacu pada kriteria Sugiono (2013;184) termasuk dalam kriteria hubungan yang sangat kuat karena berada pada interval 0,60 – 0,799. Sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang kuat antara komite audit dan audit internal dengan *Good Corporate Governance*.

c) Analisis Korelasi Parsial

**Tabel 4.17 Analisis Korelasi Parsial
Correlations**

		GCG
Komite Audit	Pearson Correlation	,716
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	35
Audit Internal	Pearson Correlation	,428
	Sig. (2-tailed)	,010
	N	35

- Hubungan Komite audit dengan *Good Corporate Governance*

Nilai korelasi yang diperoleh antara antara komite audit dengan *Good Corporate Governance* adalah sebesar 0,716. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin tinggi komite audit maka akan diikuti dengan tingginya *Good Corporate Governance*. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, angka sebesar 0,716 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat karena berada pada rentang interval 0,60-0,799.

- Hubungan Audit internal dengan *Good Corporate Governance*

Nilai korelasi yang diperoleh antara antara audit internal dengan *Good Corporate Governance* adalah sebesar 0,428. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin baik audit internal maka akan diikuti dengan tingginya *Good Corporate Governance*. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, angka sebesar 0,428 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat karena berada pada rentang interval 0,40 - 0,599.

d) Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Pada permasalahan yang sedang diteliti yaitu pengaruh komite audit dan audit internal secara simultan dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap *Good Corporate Governance*. Dengan menggunakan SPSS, diperoleh *output* sebagai berikut:

Tabel 4.18 Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,791 ^a	,625	,602	3,086878

a. Predictors: (Constant), Audit Internal, Komite Audit

b. Dependent Variable: GCG

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa *R-square* sebesar 0,625 atau 62,5%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa komite audit dan audit internal secara simultan dalam memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap *Good Corporate Governance* sebesar 62,5%. Sedangkan sisanya sebesar $100\% - 62,5\% = 37,5\%$ lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

Sedangkan untuk melihat besar pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dilakukan perhitungan dengan menggunakan formula *Beta x Zero Order*. Beta adalah koefisien regresi yang telah distandarkan, sedangkan *zero order* merupakan korelasi parsial dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai *beta* dan *zero order* sebagai berikut:

**Tabel 4.19 Pengaruh Parsial
Coefficients^a**

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Komite Audit	,671	,716
	Audit Internal	,339	,428

a. Dependent Variable: GCG

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilakukan perhitungan untuk memperoleh pengaruh parsial dari setiap variabel bebas sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Komite audit} & 0,671 \times 0,716 = 0,480 \text{ atau } 48,0\% \\ \text{Audit internal} & 0,339 \times 0,428 = 0,145 \text{ atau } 14,5\% \\ \text{Total Pengaruh} & = 0,625 \text{ atau } 62,5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa pengaruh variabel komite audit terhadap *Good Corporate Governance* adalah sebesar 48,0%, dan audit internal memberikan kontribusi pengaruh sebesar 14,5%. Sehingga dapat disimpulkan variabel yang paling dominan mempengaruhi *Good Corporate Governance* adalah komite audit dengan besaran pengaruh yang diberikan sebesar 48,0%.

e) Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F Anova)

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan apakah komite audit, dan audit internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance* dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut.

Ho: $\beta_1 = \beta_2 = 0$ Tidak terdapat pengaruh dari komite audit, dan audit internal terhadap *Good Corporate Governance* di PT. Pos Indonesia.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ Terdapat pengaruh dari komite audit, dan audit internal terhadap *Good Corporate Governance* di PT. Pos Indonesia.

Probability = 0,05/5%

Kriteria: Tolak H_0 jika nilai f hitung $>$ f tabel, terima H_0 jika nilai f hitung $<$ f tabel.

Tabel 4.20 Uji F ANOVA
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	508,185	2	254,093	26,666	,000 ^b
	Residual	304,922	32	9,529		
	Total	813,107	34			

a. Dependent Variable: GCG

b. Predictors: (Constant), Audit Internal, Komite Audit

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 26,66 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel dimana pada tabel F untuk $\alpha = 0,05$ dan $db_1: 2$ dan $db_2: n-k-1 (35-2-1) = 32$ maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,295. Karena F_{hitung} (26,666) lebih besar dibanding F_{tabel} (3,295) maka pada tingkat kekeliruan 5% ($\alpha=0,05$) diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a . Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa komite audit dan audit internal berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance* karyawan PT. Pos Indonesia.

f) Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis parsial (uji-t) dilakukan untuk membuktikan apakah komite audit dan audit internal secara parsial berpengaruh secara signifikan

terhadap *Good Corporate Governance* dengan menggunakan program SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.21 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,610	3,126		2,115	,042
	Komite Audit	,890	,145	,671	6,141	,000
	Audit Internal	,349	,112	,339	3,101	,004

a. Dependent Variable: GCG

Adapun hipotesis statistik secara parsial yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Komite Audit

$H_0 : \beta_1 = 0$ Secara parsial komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance* di PT. Pos Indonesia.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ Secara parsial komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance* di PT. Pos Indonesia.

2. Audit Internal

$H_0 : \beta_2 = 0$ Secara parsial audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance* di PT. Pos Indonesia.

$H_2 : \beta_2 \neq 0$ Secara parsial audit internal berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance* di PT. Pos Indonesia.

Kriteria:

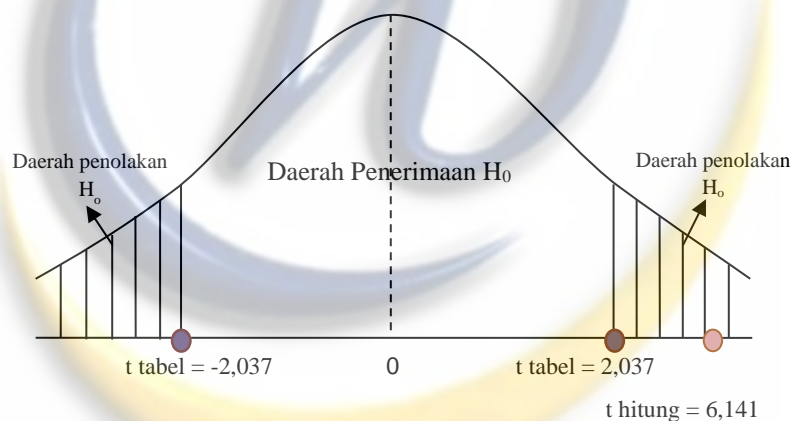
Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel} / -t_{hitung} < -t_{tabel}$

Tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, $dk = (n-k-1) 35-2-1 = 32$, dengan pengujian 2 pihak sehingga diperoleh t-tabel sebesar 2,037.

**Tabel 4.22 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,610	3,126		2,115	,042
	Komite Audit	,890	,145	,671	6,141	,000
	Audit Internal	,349	,112	,339	3,101	,004

a. Dependent Variable: GCG



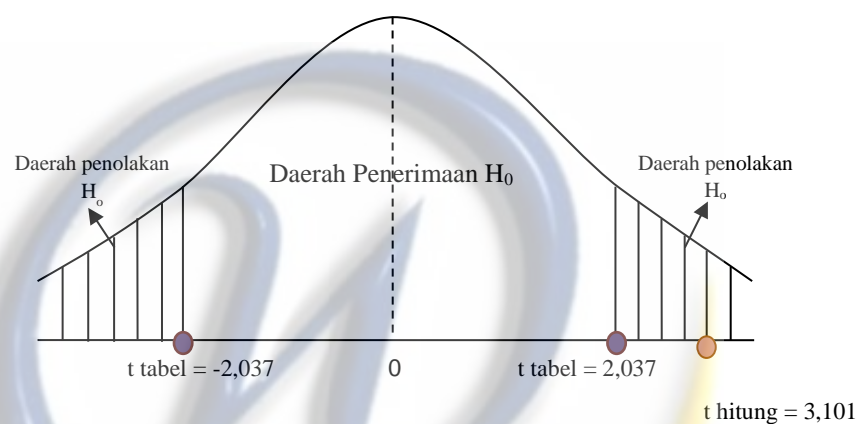
Gambar 4.7 Grafik Penolakan dan Penerimaan H_0 Variabel Komite audit Terhadap *Good Corporate Governance*

Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance* karena nilai t-hitung (6,141) lebih besar dari t tabel (2,037) dan t hitung berada pada daerah penolakan H_0 , sehingga H_a diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan dari komite audit terhadap *Good Corporate Governance* di PT. Pos Indonesia.

**Tabel 4.23 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,610	3,126		2,115	,042
	Komite Audit	,890	,145	,671	6,141	,000
	Audit Internal	,349	,112	,339	3,101	,004

a. Dependent Variable: GCG



Gambar 4.8 Grafik Penolakan dan Penerimaan H_0 Variabel Audit internal Terhadap *Good Corporate Governance*

Audit internal berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance* karena nilai t-hitung (3,101) lebih besar dari t tabel (2,037) dan t hitung berada pada daerah penolakan H_0 , sehingga H_a diterima, artinya audit internal berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance* di PT. Pos Indonesia.

4.2 Pembahasan

Penulis pada bagian ini membahas hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Fokus pembahasan pada bagian ini mengenai rumusan tentang pengaruh peran komite audit dan audit internal terhadap *good corporate governance* di PT.POS Indonesia.

4.2.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Good Corporate Governance* di PT.

Pos Indonesia

Komite Audit pada PT. Pos Indonesia dikategorikan memiliki pengaruh.

Hal ini tercermin dari:

1) **Tanggung Jawab Atas laporan Keuangan**

Komite Audit pada PT. Pos Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap meneliti dan menelaah laporan keuangan tahunan. Hal ini terjadi karena PT. Pos Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan terhadap hasil audit.

2) **Tanggung Jawab Atas Tata Kelola Perusahaan**

Komite Audit selalu memberikan penilaian terhadap kinerja perusahaan. Hal ini terjadi karena komite audit selalu memastikan untuk melaporkan hasil pemeriksaan dan temuan lainnya sehingga komite audit akan dengan mudah memberikan penilaian.

3) **Tanggung Jawab Atas Pengawasan Perusahaan**

Komite Audit pada PT. Pos Indonesia belum mampu memahami tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko. Hal ini dikarenakan komite audit belum mampu mengawasi tugas yang dilakukan oleh auditor internal, serta belum memiliki perencanaan yang baik setiap akan melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial (uji t) diperoleh bahwa nilai korelasi yang diperoleh antara antara komite audit dengan *Good Corporate Governance* adalah sebesar 0,716. Nilai korelasi bertanda positif yang

menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin tinggi komite audit maka akan diikuti dengan tingginya *Good Corporate Governance*. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, angka sebesar 0,716 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat karena berada pada rentang interval 0,60-0,799.

Pengujian perhitungan koefisien determinasi menghasilkan besar pengaruh variabel komite audit sebesar 48,0%. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, menunjukkan bahwa variabel komite audit di PT. Pos Indonesia dapat menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance* sebesar 48,0%.

Penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Puji (2010) bahwa Komite audit berpengaruh terhadap variabel penerapan *Good Corporate Governance*. Rizky (2011) menunjukkan bahwa komite audit mampu meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance*. Marcelinus, I Wayan dan Ni Putu (2014) terdapat pengaruh signifikan dan positif antara peran SPI dan Komite Audit terhadap tingkat penerapan *Good Corporate Governance*.

4.2.2 Pengaruh Audit Internal Terhadap *Good Corporate Governance* di PT. Pos Indonesia

Audit Internal pada PT. Pos Indonesia dikataegorkan memiliki pengaruh. Hal ini tercermin dari:

1) Independensi

Audit Internal pada PT. Pos Indonesia berkomunikasi untuk memperoleh informasi pada bagian yang sedang diaudit. Hal ini terjadi

karena koordinasi yang teratur antara pimpinan audit internal dengan dewan direksi dan komite audit akan membantu terjaminnya kemandirian dan juga merupakan sarana bagi semua pihak untuk dapat saling memberikan informasi secara keseluruhan serta dapat bersikap tidak memihak (objektif) dalam melakukan tugas.

2) Kemampuan Profesional

Audit Internal pada PT. Pos Indonesia memiliki latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja dalam bidang audit untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat dan cepat. Hal ini dikarenakan audit internal mengikuti pendidikan keahlian dibidang audit internal untuk meningkatkan keahliannya.

3) Lingkup Pekerjaan

Pelaksanaan audit yang dilaksanakan pada PT. Pos Indonesia yaitu pelaksanaan audit yang didasarkan pada program yang telah disusun sebelumnya. Serta lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian yang dimiliki PT. Pos Indonesia, serta memastikan apakah sistem telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

4) Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Audit Internal pada PT. Pos Indonesia selalu melaksanakan aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial (uji t) diperoleh bahwa nilai korelasi yang diperoleh antara antara audit internal dengan *Good Corporate Governance* adalah sebesar 0,428. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin baik audit internal maka akan diikuti dengan tingginya *Good Corporate Governance*. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, angka sebesar 0,428 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat karena berada pada rentang interval 0,40 - 0,599.

Pengujian perhitungan koefisien determinasi menghasilkan besar pengaruh variabel audit internal sebesar 14,5%. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, menunjukkan bahwa variabel audit internal di PT. Pos Indonesia dapat menjelaskan bahwa audit internal berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance* sebesar 14,5%.

Penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rismawati, Muh Yusuf dan Rezki (2015) Audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Good Corporate Governance*. Gumilang (2009) menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance*. Ika kurnia (2011) menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.

4.2.3 Pengaruh Komite Audit dan Audit Internal Terhadap *Good Corporate Governance* di PT. Pos Indonesia

Selain itu, Pengaruh *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia meliputi:

1) Transparansi

Informasi yang dihasilkan oleh perusahaan sudah dilaksanakan dengan jelas, lengkap, mudah dimengerti oleh pihak yang membutuhkan dan dapat menggambarkan keadaan perusahaan dengan baik.

2) Akuntabilitas

Setiap karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya, namun belum dapat bekerja secara rinci dan bertanggung jawab pada perusahaan.

3) Kemandirian

Selama ini PT. Pos Indonesia bebas dari benturan kepentingan dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun.

4) Pertanggung Jawaban

PT. Pos Indonesia sudah patuh terhadap peraturan-peraturan perusahaan dalam bekerja, serta patuh terhadap Undang-undang Badan Usaha Milik Negara.

5) Kewajaran

PT. Pos Indonesia selalu memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada *stakeholder* sesuai dengan kontribusi yang diberikan, PT. Pos Indonesia memberikan kebijakan kompensasi positif berupa penghargaan atau intensif terhadap keberhasilan kinerja serta memberikan kebijakan negatif berupa hukuman dan teguran terhadap kinerja yang buruk.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis simultan (uji f) diperoleh bahwa F_{hitung} sebesar 26,66 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel dimana pada tabel F untuk $\alpha = 0,05$ dan $db_1: 2$ dan $db_2: n-k-1 (35-2-1) = 32$ maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,295. Karena F_{hitung} (26,666) lebih besar dibanding F_{tabel} (3,295) maka pada tingkat kekeliruan 5% ($\alpha=0,05$) diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a . Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa komite audit dan audit internal berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance* karyawan PT. Pos Indonesia.

Pengujian perhitungan koefisien determinasi menghasilkan besar pengaruh variabel komite audit dan audit internal sebesar 62,5%. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, menunjukkan bahwa variabel komite audit dan audit internal di PT. Pos Indonesia dapat menjelaskan bahwa komite audit dan audit internal berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerapan *Good Corporate Governance* sebesar 62,5%.

Penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Abbott, Parker dan Peters dalam Akhmad Syahroza (2009) bahwa peran komite audit berfungsi melakukan penunjukkan kantor akuntan publik dan melakukan evaluasi atas kinerja, melakukan kerjasama dengan auditor internal maupun eksternal auditor dalam menghasilkan laporan keuangan yang dapat mencerminkan kondisi *Good Corporate Governance*. (Dian Sita A, 2012) Komite Audit dan Audit Internal memiliki peran signifikan bagi perusahaan, Komposisi komite audit telah sesuai dengan keputusan menteri BUMN, serta audit internal menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya dengan baik terhadap perusahaan selain itu perusahaan berperan aktif dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan menerapkan kelima prinsip tata kelola perusahaan



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komite audit berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance* di PT. Pos Indonesia. Penerapan *Good Corporate Governance* yang masih belum optimal disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko. Hal ini dikarenakan komite audit belum mampu mengawasi tugas yang dilakukan oleh auditor internal, maka perlu dilakukan perencanaan yang baik setiap akan melakukan pemeriksaan sehingga risiko dapat diprediksi. Namun, hasil penelitian membuktikan bahwa komite audit menjalankan fungsinya dengan baik dengan cara bertanggung jawab terhadap meneliti dan menelaah laporan keuangan, melakukan tanggung jawab pengawasan terhadap hasil audit, serta selalu memberikan penilaian terhadap kebijakan perusahaan.
2. Audit internal berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance* di PT. Pos Indonesia. Penerapan *Good Corporate Governance* yang masih belum baik disebabkan oleh kurangnya pelaksanaan aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. Maka perlu dilakukan perencanaan pemeriksaan yang meliputi; penetapan tujuan pemeriksaan, pemberitahuan kepada pihak yang dianggap

3. perlu, penetapan program pemeriksaan, menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil pemeriksaan akan disampaikan dan memperoleh persetujuan atau rencana kerja pemeriksaan. Namun, hasil penelitian membuktikan bahwa audit internal telah dilaksanakan dengan baik dimana audit internal berkomunikasi untuk memperoleh informasi pada bagian yang sedang diaudit, serta pelaksanaan audit yang dilaksanakan telah didasarkan pada program yang telah disusun sebelumnya sehingga dapat digunakan pada fungsi dan tugas mereka masing-masing secara jelas.
4. Komite Audit dan Audit Internal berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance*, Penerapan *Good Corporate Governance* yang masih belum optimal disebabkan oleh Komite Audit belum memahami tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko. Sedangkan, Audit Internal belum bisa melakukan aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. Namun, hasil penelitian membuktikan bahwa *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia dapat dikatakan baik, hal ini didukung dengan profesionalitas yang dilakukan dengan patuh terhadap peraturan-peraturan perusahaan dalam bekerja, serta bebas dari benturan kepentingan dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun.

5.2 Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan didasarkan dari hasil kesimpulan penelitian ini adalah:

1) **Saran Operasional**

Untuk meningkatkan *Good Corporate Governance*, sebaiknya:

- Komite Audit pada PT. Pos Indonesia diharapkan mampu memahami tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko secara menyeluruh sehingga risiko dapat diprediksi dengan cara melakukan evaluasi terhadap risiko.
- Audit internal pada PT. Pos Indonesia diharapkan mampu memiliki perencanaan yang lebih baik disetiap akan melakukan pemeriksaan, sehingga pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lebih efektif dalam menjalankan fungsi audit internal untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Auditor Internal sebaiknya lebih optimal lagi dalam melaksanakan pengawasan audit yang disusun secara rinci sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

2) **Saran Pengembangan Ilmu**

Peneliti yang akan datang diharapkan dapat menguji kembali bagaimana *Good Corporate Governance* dipengaruhi oleh komite audit dan audit internal, selanjutnya mampu menjadi salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, sehingga diharapkan penelitian bisa dilakukan pada perusahaan-perusahaan lainnya khususnya yang termasuk ke dalam Badan Usaha Milik Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, W. 2008. *Audit Internal, Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPFYogyakarta.
- Arens, A.A., Elder, R.J., Beasley, M.S. 2010. *Auditing and Assurance Pendekatan Terintegrasi Jilid 1*, Edisi 12. Jakarta : Erlangga.
- Ariefiansyah, R. 2015. *Pengaruh Kualitas Audit Internal Terhadap Good Corporate Governance*. Bandung. Skripsi Universitas Widyatama.
- Berlian, V. 2014. *Pengaruh Komite Audit dan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance*. Bandung. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Cassandra, R. 2014. *Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal dan Komite Audit Terhadap Penerapan Good Corporate Governance*. Surakarta. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Chrisdianto, B. 2013. *Peran Komite Audit Dalam Good Corporate Governance*. *Jurnal Akuntansi Aktual*, II(1), 1-8.
- Destiana. 2014. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance*. Bandung. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Edison, A. 2016. *Analisis Regresi & Jalur* . Bandung : Salemba Empat.
- Effendi, A. 2016. *The Power of Good Corporate Governance*. Jakarta : Salemba Empat.
- Faridz, R. A. 2015. *Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Profesionalisme Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance*. Bandung. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19* (Vol. 5). Semarang. Universitas Diponegoro.

- Gusnardi. 2011. *Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan*. 15(1), 130-146.
- Hery. 2010. *Potret Profesi Audit Internal*. Bandung : Alfabeta.
- Hery. 2017. *Auditing dan Asurans*. Jakarta : Grasindo.
- Husein, U. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Vol. 1). Jakarta : Rajawali Pers.
- Jayanegara, L. L. 2014. *Peranan Audit Internal Dalam Penerapan Good Corporate Governance*. Bandung. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Kaunang, A. F. 2013. *Pedoman Audit Internal*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Kumaat, G. V. 2011. *Internal Audit*. Jakarta : Erlangga.
- Kurniawan, A. 2015. *Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi*. Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA.
- Muda, D. I. 2015. *Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal, Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance*. Bandung. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Nasution. S. 2009. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian* (Vol. 6). Bogor : Ghalia Indonesia.
- Noor, J. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Nugraha, Ridhan. 2016. *Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan*. Bandung. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Nurjanah , R. 2015. *Pengaruh Audit Internal Bersertifikasi Qualified Internal Auditor Terhadap Kualitas Laporan Audit Internal*. Bandung. Skripsi. Universitas Widyatama.

- Nuryaman, & Veronica. 2015. *Metodelogi penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Bandung : Ghalia Indonesia.
- Pratami, D. P. 2014. *Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah*. Bandung. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Puji, D. S. 2010. *Peran Internal Audit dan Komite Audit Dalam mewujudkan Good Corporate Governance*. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 8(1), 1-9.
- Ratnasari, I. 2015. *Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance*. Bandung. Skripsi. Institut Teknologi Bandung.
- Rohmah, S. A. 2014. *Pengaruh Audit Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Perwujudan Good Corporate Governance*. Bandung. Skripsi. Universitas Pasundan.
- Sekaran, Uma. 2010. *Research Methods For Business*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Vol. 19). Bandung : Alfabeta.
- Supangat, Andi. 2007. *Statistika Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung : Pustaka.
- Ulfany, H. E. 2016. *Pengaruh Kompetensi Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance*. Bandung. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Wahyuni, S. 2016. *Pengaruh karakteristik Komite Audit Sebagai Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan*. Bandung. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Zarkasyi, M. W. 2008. *Good Corporate Governance*. Bandung : Alfabeta.

Sumber Internet:

<http://www.fcgi.co.id> *Forum for Corporate Governance in Indonesia.*

www.bpkp.go.id Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 juli 2002 yang kemudian diubah menjadi PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara bagi BUMN.

www.komiteaudit.org Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.







LAMPIRAN A
KUESIONER
PENELITIAN

Perihal: Permohonan Pengisian Kuesioner Penelitian Program Strata-1 (S1)

Kepada Yth.

Kepala bagian Satuan Pengawasan Intern/Auditor Internal
PT. Pos Indonesia (Persero)

Dengan Hormat,

Bersama dengan ini saya: Maritsa Fajriati/NPM. 0113U358, mahasiswa Program Strata-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, bermaksud memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner yang datanya sangat dibutuhkan untuk penelitian akhir dalam penyusunan skripsi. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami lampirkan surat keterangan dari Fakultas untuk penelitian ini.

Penelitian yang kami lakukan untuk mengetahui Pengaruh Peran Komite Audit dan Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan peranan auditor internal dalam GCG perusahaan, serta peningkatan terhadap ilmu pengetahuan.

Sesuai dengan etika penelitian, data yang diperoleh dari Bapak/Ibu sekalian akan kami jaga kerahasiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktu mengisi kuesioner ini.

Hormat Saya,

Maritsa Fajriati

DAFTAR KUESIONER

Petunjuk Pengisian

Pertanyaan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian A merupakan pernyataan umum dan bagian B merupakan pertanyaan khusus. Jika Bapak/Ibu berkeberatan untuk mencatumkan nama, maka pertanyaan pada bagian A boleh tidak diisi.

A. Pertanyaan Umum

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis kelamin : Laki-Laki Perempuan
4. Pendidikan terakhir :
5. Jabatan/Pekerjaan :
6. Lama bekerja :

B. Pernyataan Khusus

Pernyataan Kuesioner ini mengenai “Pengaruh Peran Komite Audit dan Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*” pada Perusahaan tempat Bapak/Ibu bekerja. Bapak/Ibu dimohon untuk memeberikan tanda *check list* pada jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai.

Adapun alternatif jawaban sebagai berikut:

1. Selalu (SL)
2. Sering (SR)
3. Kadang-Kadang (KK)
4. Jarang (JR)
5. Tidak Pernah (TP)

Pertanyaan :

NO	Pertanyaan	SL	SR	KK	JR	TP
1.	Komite Audit memiliki tanggung jawab terhadap meneliti dan menelaah laporan keuangan tahunan					
2.	Selama ini Komite Audit selalu melakukan tanggung jawab pengawasan terhadap hasil audit					
3.	Komite Audit selalu memastikan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan <i>Corporate Governance</i> dan temuan penting lainnya					
4.	Selama ini Komite Audit selalu memberikan penilaian terhadap kebijakan perusahaan					
5.	Selama ini Komite Audit memahami tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko					
6.	Komite audit di tempat bapak/ibu bekerja selalu memonitor hasil pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.					
7.	Bapak/ibu berkomunikasi untuk memperoleh informasi pada bagian yang sedang diaudit					
8.	Bapak/ibu bersikap tidak memihak (objektif) dalam melakukan tugas audit.					
9.	Bapak/ibu memiliki latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja dalam bidang audit untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat.					
10.	Selama ini bapak/ibu mengikuti pendidikan keahlian dibidang Audit Internal yang diselenggarakan oleh YPIA (yayasan					

	pendidikan internal audit) dan institusi lain yang meningkatkan keahliannya.					
11.	Selama ini pelaksanaan audit yang dilaksanakan bapak/ibu didasarkan pada program yang telah disusun sebelumnya.					
12.	Bapak/ibu dalam melaksanakan audit melakukan evaluasi terhadap risiko yang berkaitan dengan system informasi, efektifitas, dan efisiensi operasi, kesesuaian terhadap hukum undang-undang dan keamanan aset.					
13.	Bapak/ibu selalu melaksanakan aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.					
14.	Bapak/ibu memiliki perencanaan yang baik setiap akan melakukan pemeriksaan sehingga risiko dapat diprediksi.					
15.	Informasi yang dihasilkan oleh perusahaan tempat bapak/ibu bekerja sudah jelas, lengkap, mudah dimengerti oleh pihak yang membutuhkan khususnya pemegang saham atau <i>stakeholder</i> .					
16.	Informasi yang disediakan oleh perusahaan dimana tempat bapak/ibu bekerja sudah jelas dan dapat menggambarkan keadaan perusahaan dengan baik.					
17.	Setiap karyawan perusahaan tempat bapak/ibu bekerja memiliki kemampuan yang sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya.					


18.	Bapak/ibu bekerja secara rinci dan bertanggung jawab pada perusahaan.					
19.	Selama ini perusahaan tempat bapak/ibu bekerja bebas dari benturan kepentingan dari segala pengaruh dan tekanan.					
20.	Selama ini perusahaan tempat bapak/ibu bekerja terhindar dari tekanan dari pihak manapun.					
21.	Perusahaan tempat bapak/ibu bekerja sudah patuh terhadap Undang-undang Badan Usaha Milik Negara.					
22.	Bapak/ibu sudah patuh terhadap peraturan-peraturan perusahaan dalam bekerja.					
23.	Perusahaan tempat bapak/ibu bekerja selalu memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada <i>stakeholder</i> sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.					
24.	Adanya kebijakan kompensasi positif (penghargaan atau insentif) terhadap keberhasilan karyawan atau negatif (hukuman atau teguran) terhadap kinerja yang buruk dari perusahaan tempat bapak/ibu bekerja.					



LAMPIRAN B
TABULASI HASIL
JAWABAN
RESPONDEN

Nomor Respond	Komite Audit						Audit Internal								GCG								X1	X2	Y				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				23	24		
1	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	24	18	32
2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18	29	32
3	4	4	4	4	4	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	22	25	30	
4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	24	24	37	
5	4	4	2	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	2	18	23	29	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	4	4	4	3	3	4	3	2	3	3	3	18	22	33	
7	2	2	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	20	24	35	
8	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	4	3	4	4	12	24	29	
9	4	4	3	4	3	4	5	5	5	5	5	5	2	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	22	35	37	
10	2	4	2	4	2	4	2	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	18	22	36	
11	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	24	23	34	
12	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	24	24	37	
13	4	4	3	4	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	2	4	22	23	34	
14	2	2	2	2	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	4	2	4	3	3	14	24	30	
15	4	4	4	2	4	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	20	22	30	
16	4	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	20	23	30	
17	3	4	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	20	23	34	
18	2	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	4	3	2	4	3	3	3	14	24	31	
19	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	2	3	3	4	3	4	4	20	24	30	
20	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	19	24	29	
21	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	24	24	36	
22	4	4	3	4	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	22	23	35	
23	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	4	4	4	4	21	24	33	
24	4	4	3	4	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	23	23	36	
25	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	20	24	32	
26	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	22	24	33	
27	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	4	4	4	4	23	24	33	
28	3	4	4	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	2	2	22	23	34	
29	3	4	4	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	2	4	3	4	21	24	36	
30	3	4	4	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	4	3	4	4	3	3	2	2	18	23	29	
31	4	4	4	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	4	3	4	4	3	4	4	22	24	34	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	4	4	4	4	2	3	18	24	32	
33	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	12	26	22	
34	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	2	26	40	44	
35	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	2	2	4	4	4	4	21	32	36	

	Successive Interval																						X1	X2	Y		
	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4			
1	3,128	3,083	3,259	3,128	3,342	2,876	4,050	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,535	2,506	2,266	2,365	2,725	2,408	2,097	3,471	2,496	3,355	18,816	11,050	26,223
2	1,986	1,734	2,025	1,907	2,135	1,896	4,050	2,781	3,914	3,986	3,138	4,066	4,424	2,786	2,535	3,871	3,492	2,365	2,725	2,408	2,097	2,096	2,496	2,075	11,683	29,144	26,159
3	3,128	3,083	3,259	3,128	3,342	1,000	2,695	2,781	3,914	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	2,535	2,506	2,266	2,365	2,725	2,408	2,097	2,096	2,496	2,075	16,940	23,478	23,569
4	3,128	3,083	3,259	3,128	3,342	2,876	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	2,535	2,506	3,492	3,738	4,151	3,704	3,218	3,471	2,496	3,355	18,816	22,170	32,666
5	3,128	3,083	1,000	3,128	1,000	1,000	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	1,000	2,535	3,871	1,000	2,365	2,725	2,408	2,097	2,096	2,496	1,000	12,339	20,384	22,593
6	1,986	1,734	2,025	1,907	2,135	1,896	2,695	2,781	2,605	1,000	3,138	1,000	2,827	2,786	3,812	3,871	3,492	2,365	2,725	3,704	2,097	1,000	2,496	2,075	11,683	18,832	27,637
7	1,000	1,000	3,259	3,128	3,342	2,876	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	2,535	2,506	3,492	2,365	2,725	3,704	3,218	2,096	3,956	3,355	14,605	22,170	29,951
8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	2,535	2,506	2,266	1,000	2,725	1,000	1,000	3,471	2,496	3,355	6,000	22,170	22,354
9	3,128	3,083	2,025	3,128	2,135	2,876	4,833	4,833	4,697	4,697	5,293	4,697	1,000	2,786	2,535	3,871	3,492	3,738	2,725	2,408	3,218	3,471	3,956	3,355	16,376	32,837	32,768
10	1,000	3,083	1,000	3,128	1,000	2,876	1,000	2,781	2,605	1,000	3,138	2,691	2,827	2,786	3,812	2,506	2,266	3,738	2,725	2,408	3,218	3,471	3,956	3,355	12,087	18,827	31,455
11	3,128	3,083	3,259	3,128	3,342	2,876	2,695	2,781	2,605	1,000	3,138	2,691	2,827	2,786	2,535	2,506	2,266	2,365	4,151	2,408	3,218	3,471	2,496	3,355	18,816	20,523	28,770
12	3,128	3,083	3,259	3,128	3,342	2,876	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	3,812	2,506	1,000	3,738	4,151	3,704	3,218	3,471	3,956	3,355	18,816	22,170	32,911
13	3,128	3,083	2,025	3,128	2,135	2,876	2,695	1,000	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	3,812	3,871	3,492	2,365	2,725	2,408	3,218	2,096	1,000	3,355	16,376	20,389	28,341
14	1,000	1,000	1,000	1,000	3,342	1,000	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	2,535	3,871	2,266	1,000	2,725	1,000	3,218	1,000	3,956	2,075	8,342	22,170	23,645
15	3,128	3,083	3,259	1,000	3,342	1,000	1,000	2,781	2,605	2,647	3,138	1,000	2,827	2,786	2,535	2,506	2,266	2,365	2,725	2,408	2,097	2,096	2,496	2,075	14,812	18,784	23,569
16	3,128	3,083	3,259	1,907	2,135	1,000	1,000	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	2,535	2,506	2,266	2,365	2,725	2,408	2,097	2,096	2,496	2,075	14,513	20,475	23,569
17	1,986	3,083	2,025	3,128	2,135	1,896	2,695	2,781	1,000	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	2,535	3,871	3,492	2,365	4,151	2,408	3,218	2,096	2,496	2,075	14,253	20,565	28,706
18	1,000	3,083	1,000	1,000	1,000	1,000	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	2,535	3,871	2,266	1,000	4,151	2,408	1,000	3,471	2,496	2,075	8,083	22,170	25,273
19	1,986	1,734	2,025	3,128	3,342	1,896	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	2,535	3,871	1,000	1,000	1,000	2,408	2,097	3,471	2,496	3,355	14,111	22,170	23,232
20	1,986	3,083	3,259	1,907	2,135	1,000	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	2,535	2,506	2,266	1,000	2,725	2,408	2,097	2,096	2,496	2,075	13,371	22,170	22,204
21	3,128	3,083	3,259	3,128	3,342	2,876	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	2,535	3,871	2,266	3,738	4,151	2,408	3,218	3,471	2,496	3,355	18,816	22,170	31,509
22	3,128	3,083	2,025	3,128	2,135	2,876	2,695	1,000	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	3,812	2,506	2,266	2,365	4,151	2,408	2,097	3,471	3,956	3,355	16,376	20,389	30,386
23	3,128	3,083	3,259	1,907	2,135	1,896	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	2,535	2,506	2,266	2,365	2,725	3,704	1,000	3,471	3,956	3,355	15,409	22,170	27,883
24	3,128	3,083	2,025	3,128	3,342	2,876	2,695	2,781	1,000	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	2,535	2,506	3,492	3,738	4,151	3,704	3,218	3,471	2,496	2,075	17,582	20,565	31,386
25	1,986	3,083	2,025	3,128	2,135	1,896	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	2,535	2,506	2,266	2,365	2,725	2,408	2,097	3,471	2,496	3,355	14,253	22,170	26,223
26	3,128	3,083	2,025	3,128	2,135	2,876	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	2,535	3,871	3,492	2,365	4,151	2,408	2,097	2,096	2,496	2,075	16,376	22,170	27,585
27	3,128	3,083	3,259	3,128	2,135	2,876	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	2,535	2,506	2,266	2,365	2,725	3,704	1,000	3,471	3,956	3,355	17,610	22,170	27,883
28	1,986	3,083	3,259	1,907	3,342	2,876	2,695	2,781	1,000	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	3,812	2,506	3,492	2,365	2,725	2,408	3,218	3,471	3,956	1,000	16,453	20,565	28,952
29	1,986	3,083	3,259	3,128	1,000	2,876	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	3,812	3,871	3,492	2,365	4,151	3,704	1,000	3,471	2,496	3,355	15,333	22,170	31,717
30	1,986	3,083	3,259	1,000	2,135	1,000	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	1,000	1,000	2,506	1,000	3,738	2,725	3,704	2,097	2,096	2,496	1,000	12,464	20,384	22,362
31	3,128	3,083	3,259	3,128	1,000	2,876	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	3,812	1,000	2,266	2,365	4,151	2,408	3,218	3,471	2,496	3,355	16,475	22,170	28,542
32	1,986	1,734	2,025	1,907	2,135	1,896	2,695	2,781	2,605	2,647	3,138	2,691	2,827	2,786	1,000	2,506	3,492	2,365	2,725	3,704	3,218	3,471	1,000	2,075	11,683	22,170	25,555
33	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,050	4,202	3,914	3,986	4,662	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,151	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000	23,814	13,151
34	4,771	3,083	3,259	3,128	3,342	4,477	4,833	4,833	4,697	4,697	5,293	4,697	5,114	4,978	4,833	5,293	4,866	3,738	5,574	4,978	4,687	3,471	3,956	1,000	22,060	39,143	42,396
35	3,128	3,083	3,259	1,907	1,000	2,876	4,050	4,202	3,914	3,986	4,662	4,066	4,424	4,417	4,833	3,871	2,266	3,738	4,151	1,000	1,000	3,471	3,956	3,355	15,254	33,721	31,640



LAMPIRAN C
HASIL OUTPUT SPSS

Correlations			Correlations		
		Total X1			Total X2
X1.1	Pearson Correlation	,824	X2.7	Pearson Correlation	,757
	Sig. (2-tailed)	,000		Sig. (2-tailed)	,000
	N	35		N	35
X1.2	Pearson Correlation	,672	X2.8	Pearson Correlation	,866
	Sig. (2-tailed)	,000		Sig. (2-tailed)	,000
	N	35		N	35
X1.3	Pearson Correlation	,731	X2.9	Pearson Correlation	,856
	Sig. (2-tailed)	,000		Sig. (2-tailed)	,000
	N	35		N	35
X1.4	Pearson Correlation	,756	X2.10	Pearson Correlation	,897
	Sig. (2-tailed)	,000		Sig. (2-tailed)	,000
	N	35		N	35
X1.5	Pearson Correlation	,539	X2.11	Pearson Correlation	,919
	Sig. (2-tailed)	,001		Sig. (2-tailed)	,000
	N	35		N	35
X1.6	Pearson Correlation	,748	X2.12	Pearson Correlation	,873
	Sig. (2-tailed)	,000		Sig. (2-tailed)	,000
	N	35		N	35
			X2.13	Pearson Correlation	,550
				Sig. (2-tailed)	,001
				N	35
			X2.14	Pearson Correlation	,687
				Sig. (2-tailed)	,000
				N	35

Correlations

		Total Y
Y.15	Pearson Correlation	,673
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	35
Y.16	Pearson Correlation	,423
	Sig. (2-tailed)	,011
	N	35
Y.17	Pearson Correlation	,614
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	35
Y.18	Pearson Correlation	,702
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	35
Y.19	Pearson Correlation	,493
	Sig. (2-tailed)	,003
	N	35
Y.20	Pearson Correlation	,556
	Sig. (2-tailed)	,001
	N	35
Y.21	Pearson Correlation	,557
	Sig. (2-tailed)	,001
	N	35
Y.22	Pearson Correlation	,550
	Sig. (2-tailed)	,001
	N	35
Y.23	Pearson Correlation	,508
	Sig. (2-tailed)	,002
	N	35
Y.24	Pearson Correlation	,320
	Sig. (2-tailed)	,061
	N	35

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	35	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,805	6

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,922	8

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,727	10

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Audit Internal, Komite Audit ^b		Enter

a. Dependent Variable: GCG

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,791 ^a	,625	,602	3,086878

a. Predictors: (Constant), Audit Internal, Komite Audit

b. Dependent Variable: GCG

Correlations

		GCG
Komite Audit	Pearson Correlation	,716
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	35
Audit Internal	Pearson Correlation	,428
	Sig. (2-tailed)	,010
	N	35

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,610	3,126		2,115	,042
	Komite Audit	,890	,145	,671	6,141	,000
	Audit Internal	,349	,112	,339	3,101	,004

a. Dependent Variable: GCG

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	508,185	2	254,093	26,666	,000 ^b
	Residual	304,922	32	9,529		
	Total	813,107	34			

a. Dependent Variable: GCG

b. Predictors: (Constant), Audit Internal, Komite Audit

Coefficients^a

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Komite Audit	,671	,716
	Audit Internal	,339	,428

a. Dependent Variable: GCG

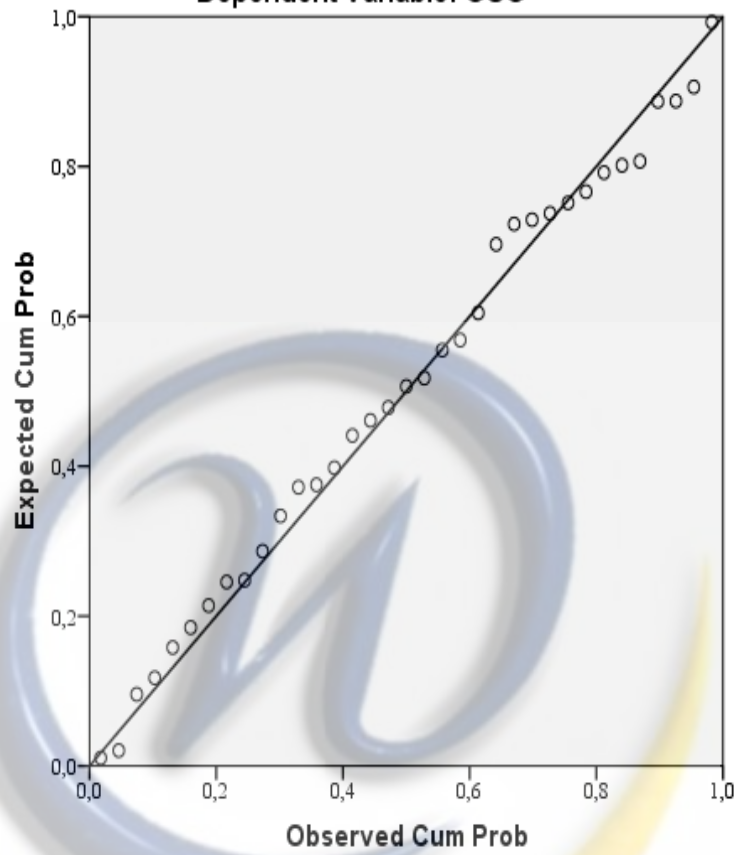
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Komite Audit	,982	1,018
	Audit Internal	,982	1,018

a. Dependent Variable: GCG

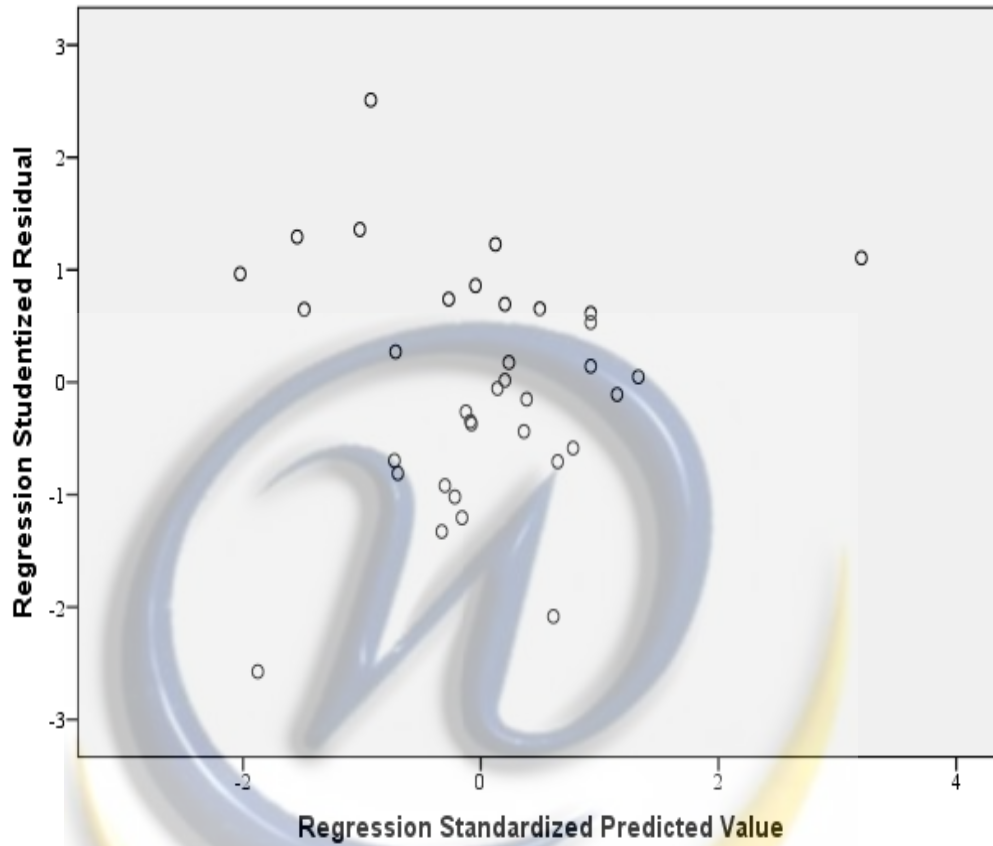
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: GCG



Scatterplot

Dependent Variable: GCG



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,99471144
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,072
	Negative	-,073
Kolmogorov-Smirnov Z		,432
Asymp. Sig. (2-tailed)		,992

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



**LAMPIRAN D
SURAT SURVEI**



LAMPIRAN E
KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI



LAMPIRAN F
REVISI SKRIPSI

LAMPIRAN G
RIWAYAT HIDUP
PENULIS



DATA PRIBADI

NAMA : MARITSA FAJRIATI

TEMPAT / TANGGAL LAHIR : BANDUNG / 26 SEPTEMBER 1995

JENIS KELAMIN : PEREMPUAN

AGAMA : ISLAM

KEWARGANEGARAAN : INDONESIA

ALAMAT : BUMI ADIPURA JL.CEMARA A-17

E-MAIL : maritsafajriati@yahoo.co.id

PENDIDIKAN

RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM

- 2013 - 2017 UNIVERSITAS WIDYATAMA BANDUNG
- 2010 - 2013 SMAN 25 BANDUNG
- 2007 - 2010 SMPN 48 BANDUNG
- 2001 - 2007 SDN NILEM